Pemerintah
Kabupaten Majalengka

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025

DINAS PENDIDIKAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Jln. KH.Abdul Halim
No. 233 Majalengka

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Langkung Sae. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

Majalengka, 24 Pebruari 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka

Paraf Koordinasi	
Sekdis	
Kabid SD	
Kabid SMP	
Kabid PAUD DIKMAS	
Kabid GTK	

H.Rd.MUHAMMAD UMAR MA'RUF,S.Sos,.M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196902121988031001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 memiliki sasaran strategis meningkatnya akses dan mutu pendidikan yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama, meliputi Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs, Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan, serta indikator makro pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

Sasaran meningkantnya akses pendidikan dengan indikator APM PAUD dengan target 95,78% dan realisasi 90,90%, SD/MI dengan target 91,30% dan realisasi 90,79% , dan SMP/MTs dengan target 88,28% dan realisasi 85,92%,menunjukkan hasil capaian yang beragam. Hal ini dipengaruhi oleh dinamika jumlah penduduk usia sekolah serta keberadaan peserta didik di luar rentang usia ideal, sehingga berdampak pada perhitungan indikator secara statistik. Sementara itu, APK Pendidikan Kesetaraan dengan target 38,86% dan realisasi 44,19%, menunjukkan capaian yang sangat baik, mencerminkan meningkatnya akses layanan pendidikan nonformal bagi masyarakat yang tidak terjangkau pendidikan formal.

Pada sasaran meningkatnya mutu pendidikan dengan indikator HLS dengan target 12,31 dan realisasi 12,50% dan RLS dengan target 7,71 dan realisasi 7,81 tahun 2025 berhasil mencapai dan melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan adanya perbaikan keberlanjutan pendidikan penduduk serta meningkatnya rata-rata lama pendidikan yang ditempuh masyarakat. Capaian ini menegaskan bahwa kebijakan dan program pendidikan yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Untuk efisiensi anggaran pada sasaran strategis meningkatnya akses pendidikan hanya ada satu indikator yang

mencapai 100% yaitu indikator kinerja utama APK Kesetaraan dengan capaian kinerja 120,60% efisiensi anggaran 0,54% atau sebesar Rp. 61.415.400,- dari pagu anggaran Rp. 11.426.510.000,- dengan realisasi Rp. 11.365.094.600,-. Sedangkan pada sasaran strategis meningkatnya mutu pendidikan terdiri dari 2 indikator. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan capaian 101,54% efisiensi anggaran 1,97% atau sebesar Rp.6.445.414.688,00,- dari pagu anggaran Rp.327.313.493.678,00,- dengan realisasi Rp. 320.868.078.990,-, dan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dengan capaian kinerja 101,30% efisiensi 0,054% atau sebesar Rp.309.525,- dari pagu anggaran Rp . 569.279.000,- dengan realisasi Rp . 568.969.475,-.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 menunjukkan arah pembangunan pendidikan yang positif. Efisiensi pelaksanaan program menjadi dasar penguatan kebijakan pada tahun berikutnya guna meningkatkan pemerataan akses, mutu pendidikan, serta efektivitas penggunaan anggaran secara berkelanjutan.

Daftar Isi

i — Kata Pengantar

ii — Ringkasan Eksekutif

iv — Daftar Isi

1 — BAB I Pendahuluan
- Gambaran Umum
- Data Kepegawaian
- Isu Strategis
- Sistematika Pelaporan

9 — BAB II Perencanaan Kinerja
- Rencana Strategis Tahun 2024-2026
- Perkin Tahun 2025
- Rencana Anggaran Tahun 2025

14 — BAB III Akuntabilitas Kinerja
- Pengukuran Kinerja Tahun 2025
- Analisis Capaian Kinerja
- Akuntabilitas Keuangan

78 — BAB IV Penutup

81 — Lampiran

01

PENDAHULUAN

- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2024-2026, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Dinas Pendidikan

a. Kedudukan

Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021. Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam kedudukannya tersebut, Dinas Pendidikan berperan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pendidikan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui

penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan.

b. Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pendidikan, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan; dan

e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. Bagan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi:

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Aset Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
3. Ke1ompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, membawahi:

1. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Aset Sekolah Dasar;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:

1. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
2. Seksi Kelembagaan,Sarana Prasarana dan Aset Sekolah Menengah Pertama;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahi:

1. Seksi Pembinaan Pendidik;
2. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional,

g. Ke1ompok Jabatan Fungsional.

h. Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 69 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

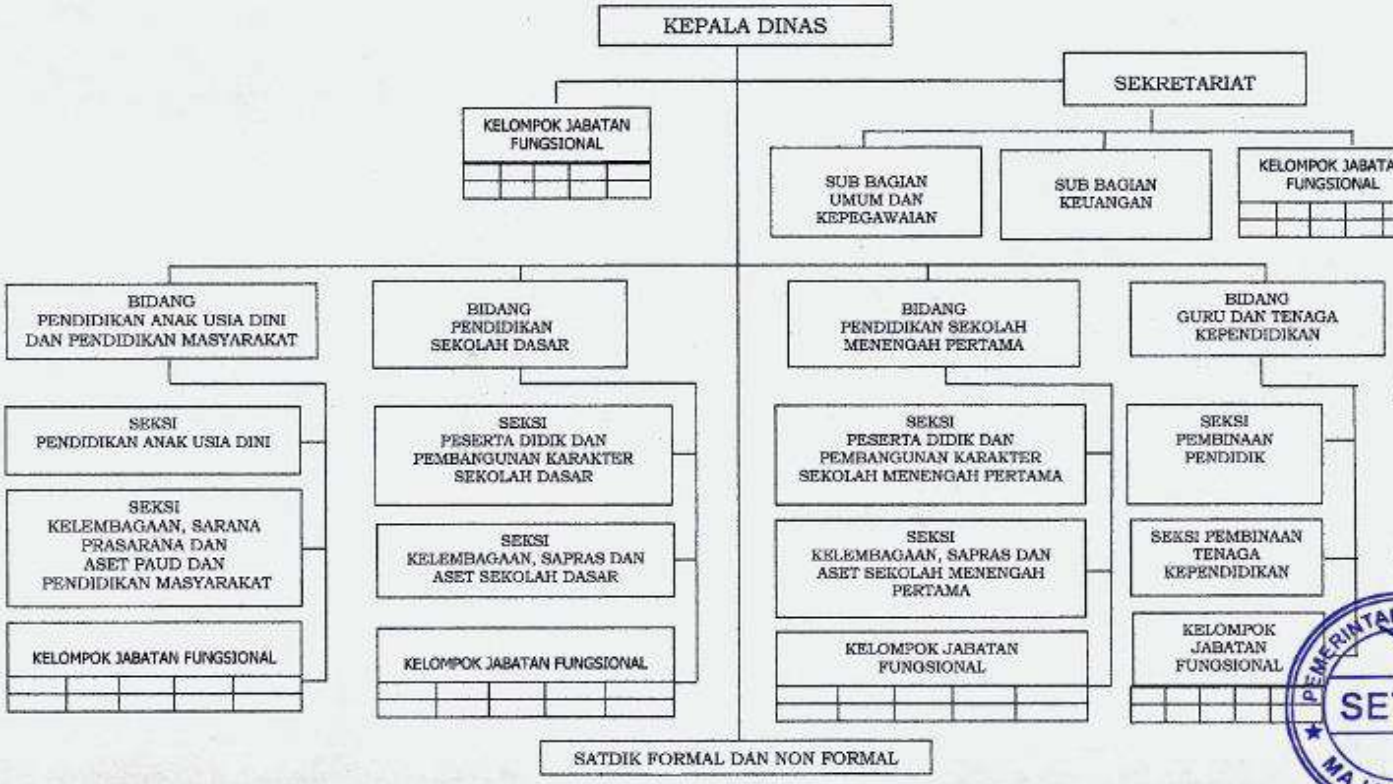

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 196312[illegible]5 198603 1 003

1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2025 berjumlah 7.174 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Perempuan : 4552 orang

Laki-laki : 2622 orang

b. Eselon

Eselon II a : orang

Eselon II b : 1 orang

Eselon III a : 1 orang

Eselon III b : 4 orang

Eselon IV a : 10 orang

Eselon IV b : 1 orang

c. Golongan

	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V	Gol IX
PNS		42	2040	1559		
PPPK					49	3485

d. Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi : 1 orang

Jabatan Administrator : 5 orang

Jabatan Pengawas : 11 orang

Jabatan Fungsional : 7569 orang

Jabatan Pelaksana : 545 orang

e. Pendidikan

SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
-	3	98	1	21	6	6812	225	5

Infografik ASN

Dinas Pendidikan

STRUKTURAL	FUNSIONAL	PELAKSANA
16	7569	545

GENDER :

Total **7142**

2622 LAKI-LAKI

4552 PEREMPUAN

ESELON :

II B	III A	III B	IV A	IV B
1	1	4	10	1

GOLONGAN

	I	II	III	IV	V	IX
PNS	0	42	2040	1559		
PPPK					49	3845

PENDIDIKAN

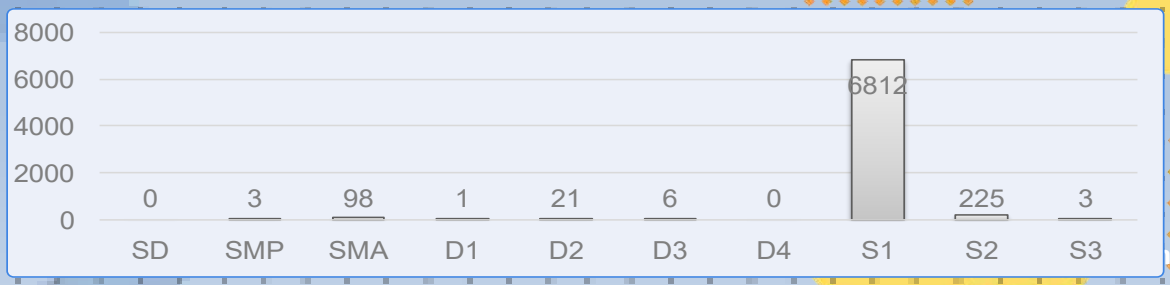

1.3 Isu Strategis

Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Majalengka, salah satu tujuan adalah meningkatnya kualitas pendidikan dengan sasaran meningkatnya akses pendidikan, serta sasaran meningkatnya mutu pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, isu strategis Dinas Pendidikan Tahun 2024–2026 difokuskan pada perluasan akses pendidikan yang merata dan inklusif bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, serta peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan kompetensi pendidik, tata kelola satuan pendidikan, dan peningkatan hasil belajar peserta didik. Kedua fokus tersebut menjadi langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

02

PERENCANAAN KINERJA

- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2024–2025 diarahkan pada dua sasaran utama, yaitu meningkatnya akses pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan. Sasaran peningkatan akses difokuskan pada perluasan partisipasi pendidikan melalui penguatan APM dan APK pada seluruh jenjang serta pencegahan anak tidak sekolah. Sementara itu, peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada perbaikan kualitas layanan pembelajaran, penguatan karakter peserta didik, serta peningkatan indikator makro pendidikan seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Kedua sasaran tersebut menjadi landasan strategis dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Kabupaten Majalengka.

Tabel 2.1.

Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menurunnya penduduk miskin	Meningkatnya akses pendidikan	APM PAUD	%	95,73	95,75	95,78
			APM SD	%	91,25	91,28	91,30
			APM SMP	%	88,15	88,25	88,28
			APK Kesetaraan	%	86,60	86,68	86,73
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatkan mutu Pendidikan	RLS	Tahun	7,55	7.75	80,00
			HLS	Tahun	12,26	12,28	12,30

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama tiga tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Menurunnya penduduk miskin	Meningkatnya akses pendidikan	APM PAUD	%	95,73	95,75	95,78	95,73	95,75	95,78
			APM SD	%	91,25	91,28	91,30	91,25	91,28	91,30
			APM SMP	%	88,15	88,25	88,28	88,15	88,25	88,28
			APK Kesetaraan	%	86,60	86,68	86,73	86,60	36,64	38,86
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatkan mutu Pendidikan	RLS	Tahun	7,55	7.75	80,00	7,55	7,71	7,82
			HLS	Tahun	12,26	12,28	12,30	12,26	12,31	12,35

Untuk tahun 2025 sasaran meningkatnya akses pendidikan dengan indikator APK Kesetaraan mengalami perubahan target. Perubahan target indikator APK Kesetaraan didasarkan pada hasil Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LPPD Tahun 2024 Kabupaten Majalengka urusan pendidikan oleh BPKP Provinsi Jawa Barat, yang menyampaikan bahwa capaian tingkat partisipasi warga usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dan berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan mengalami penyesuaian perhitungan. Capaian yang semula tercatat sebesar 52,99% berubah menjadi 34,64%, sesuai dengan hasil perhitungan yang berpedoman pada Juknis Penyusunan LPPD Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 44,22%, maka capaian tahun 2024 sebesar 34,64% terlihat mengalami penurunan sebesar 9,58%. Namun demikian, penurunan tersebut bukan

semata-mata disebabkan oleh menurunnya partisipasi masyarakat, melainkan karena adanya perubahan formulasi dan metode penghitungan indikator antara tahun 2023 dan 2024. Dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, ketersediaan sumber daya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, serta proyeksi keberlanjutan program, maka target APK/APS Kesetaraan pada periode selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian agar lebih realistis, terukur, dan akuntabel.

Begitu pula sasaran meningkatnya mutu pendidikan yang terdiri dari indikator HLS dan RLS mengalami perubahan, dikarenakan target tahun 2025 telah tercapai bahkan terlampaui pada tahun sebelumnya. Hal ini membuat target tersebut perlu disesuaikan lagi dari target HLS sebesar 12,28 menjadi 12,31 naik 0,03 poin, perubahan target tersebut berdasarkan tren peningkatan HLS periode 2022–2024 adalah naik 0,03 tahun secara kumulatif, dengan rata-rata kenaikan sekitar 0,015 tahun per tahun. Untuk indiaktor RLS juga mangalami perubahan target sebesar 7,75 menjadi 7,71, perubahan target tersebut berdasarkan tren peningkatan RLS selama periode 2022–2024 adalah naik 0,04 tahun secara kumulatif, dengan rata-rata kenaikan sekitar 0,02 tahun per tahun.

Sehingga Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami perubahan sebagaimana tertuang di Rencana Kerja Dinas Pendidikan tahun 2025 sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Tahun 2025 berdasarkan Renana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya akses pendidikan		
		APM PAUD	95,75
		APM SD	91,28
		APM SMP	88,25
		APK Kesetaraan	86,68

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
2.	Meningkatkan mutu Pendidikan		
		RLS	7.75
		HLS	12,28

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan Tahun 2025 berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya akses pendidikan		
		APM PAUD	95,78
		APM SD	91,30
		APM SMP	88,28
		APK Kesetaraan	38,86
2.	Meningkatnya mutu Pendidikan		
		RLS	7,71
		HLS	12,31

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Murni Dinas Pendidikan Tahun 2025 , ditetapkan Anggaran sebesar Rp. 1.073.420.400.286,- setelah adanya perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.050.656.542.506,36 yang terdiri dari:

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	539.821.649.828,36	51,38
Program Pengelolaan Pendidikan	510.143.724.570	48,55
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	691.168.108	0,07
JUMLAH	1.050.656.542.506,36	100

03

AKUNTABILITAS KINERJA

- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 6 (Enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Dinas Pendidian Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 102,53%. Sebanyak 3 Indikator menapai kinerja 100% lebih dan sebanyak 3 Indikator tidak menapai 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

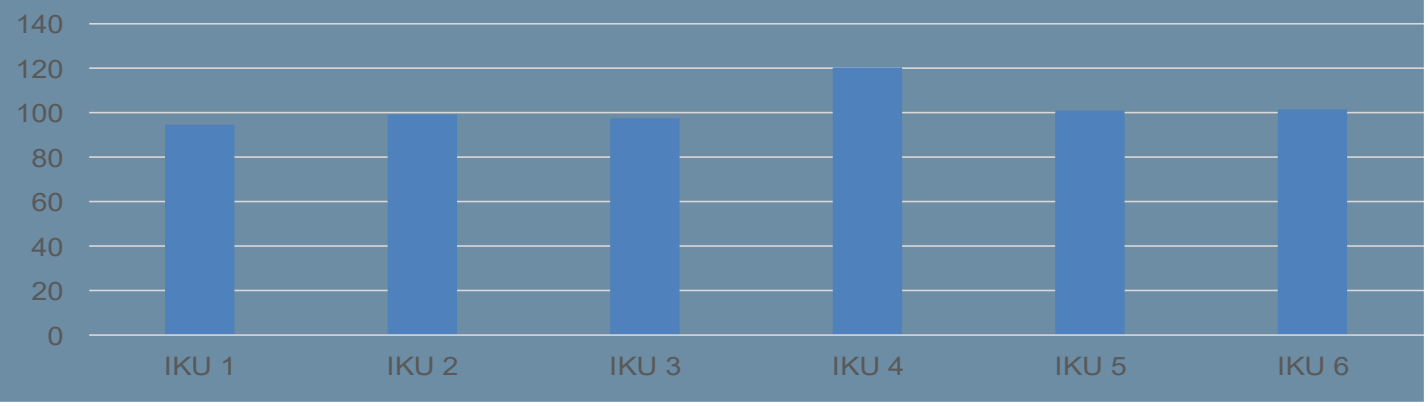

BAB III AKUNTABILITASI KINERJA

Capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, SD, dan SMP, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan, serta indikator makro pendidikan berupa Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), yang selaras dengan sasaran meningkatnya akses dan mutu pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan Majalengka pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 102,54%. Sebanyak 3 (tiga) indikator mencapai kinerja 100% atau lebih dan sebanyak 3 (tiga) Indikator tidak mencapai 100%.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target %	Realisasi %	Capaian %
1.	Meningkatnya akses pendidikan				
		APM PAUD	95,78	90,90	94,91
		APM SD	91,30	90, 79	99,46
		APM SMP	88,28	85,92	97,36
		APK Kesetaraan	38,86	44,19	120,60
2.	Meningkatkan mutu Pendidikan				
		RLS	7,71	7,81	101,30
		HLS	12,31	12,50	101,54

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SASARAN 1

MENINGKATNYA AKSES PENDIDIKAN

Untuk menjawab isu strategis meningkatnya kualitas pendidikan dan wewujudkan tujuan meningkatnya pembangunan manusia, maka ditetapkan sasaran startegis Dinas Pendidikan yaitu meningkatnya akses pendidikan dengan indikator APM PAUD,APM SD/MI, APM SMP/MTs dan APK Kesetaraan. Peningkatan akses pendidikan dimaknai sebagai upaya sistematis untuk memperluas kesempatan seluruh penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang adil, merata, dan inklusif tanpa terkendala faktor ekonomi, geografis, maupun sosial.

Melalui peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, APM SD/MI, APM SMP/MTs dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan, Dinas Pendidikan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Akses pendidikan yang semakin luas akan mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Majalengka.

Dengan demikian, sasaran meningkatnya akses pendidikan bukan hanya berorientasi pada angka partisipasi, tetapi juga menjadi fondasi strategis dalam membangun manusia Majalengka yang lebih berdaya saing, produktif, dan sejahtera.

Adapun untuk penjelasannya APM dan APK sebagai berikut :

1. APM PAUD

   Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi anak-anak dalam pendidikan anak usia dini (PAUD). Definisi operasionalnya adalah persentase jumlah anak usia 5-6 tahun yang sedang bersekolah di lembaga PAUD terhadap total populasi anak dalam kelompok usia tersebut di suatu

wilayah pada waktu tertentu. Angka Partisipasi PAUD dihitung menggunakan formulasi: Jumlah Siswa Usia 5-6 th di jenjang PAUD dibagi Jumlah Anak Usia 5-6 tahun di kali Seratus. Data capaian APM PAUD dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

2. APM SD/MI

   Angka Partisipasi Murni (APM) SD adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi anak-anak dalam pendidikan dasar pada tingkat sekolah dasar (SD)/MI. Definisi operasionalnya adalah persentase jumlah anak usia sekolah dasar (usia 7-12 tahun) yang sedang bersekolah di tingkat SD/MI terhadap total populasi anak dalam kelompok usia tersebut di suatu wilayah pada waktu tertentu. Angka Partisipasi SD/MI dihitung menggunakan formulasi: Jumlah Siswa Usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI dibagi Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun dikali Seratus. Data capaian APM SD/MI dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

3. APM SMP/MTs

   Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi anak-anak dalam pendidikan menengah pertama pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Definisi operasionalnya adalah persentase jumlah anak usia sekolah menengah pertama (usia 13-15 tahun) yang sedang bersekolah di tingkat SMP terhadap total populasi anak dalam kelompok usia tersebut di suatu wilayah pada waktu tertentu. Angka Partisipasi SMP/MTs dihitung menggunakan formulasi: Jumlah Siswa Usia 13-15 th di jenjang SMP/MTs dibagi Jumlah Penduduk Usia 13-15

th di kali Seratus. Data capaian APM SMP/MTs dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

4. APK Kesetaraan

   Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi anak-anak dalam pendidikan nonformal/ kesetaraan program paket A, B dan C. Definisi operasionalnya adalah persentase tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan. Angka Partisipasi Kesetaraan dihitung menggunakan formulasi: Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan kesetaraan dibagi anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah di kali seratus. Data capaian APK Kesetaraan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

IKU 1

APM PAUD

Meningkatnya Akses Pendidikan

Capaian Tahun 2025

94,9 1%

Target	Realisasi
95,78%	90,9 0%

Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra
92,97%	91,30%

Capaian Tahun 2024	Realisasi Provinsi/Pusat
97,28%	-

Faktor yang Mempengaruhi

- Pemberian bantuan perlengkapan sekolah pada siswa dari keluarga tidak mampu.
- Penyaluran Dana BOP PAUD untuk 832 Lembaga PAUD.

Program yang Mendukung :

Program Pengelolaan Pendidikan

Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator APM PAUD pada sasaran meningkatnya akses pendidikan tidak ada karena IKU hanya mencapai 94,95 %.

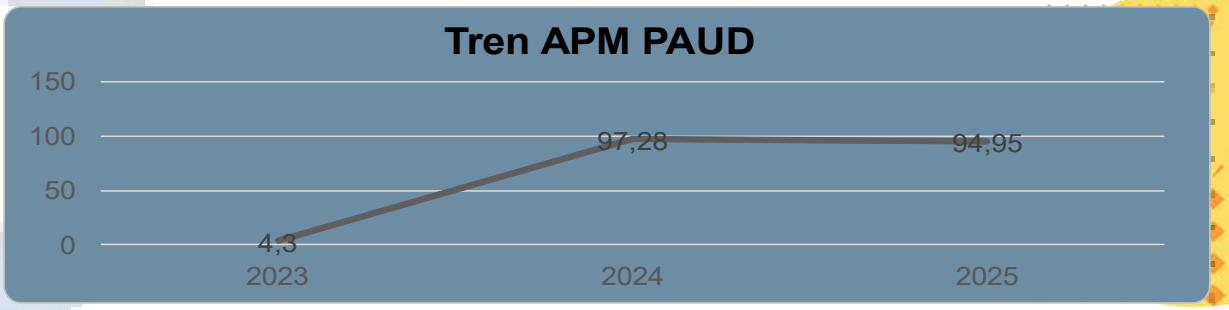

INDIKATOR 1

Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Akses Pendidikan	APM PAUD	95,78	90,90	94,91

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD ditetapkan dengan target sebesar 95,78%, sementara realisasi yang dicapai sebesar 90,91%, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada 94,95%. Kondisi ini menunjukkan bahwa target kinerja belum sepenuhnya tercapai, meskipun capaian yang diperoleh masih berada pada kategori baik.

Belum tercapainya target APM PAUD dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Dari sisi eksternal, masih terdapat sebagian anak usia PAUD yang belum terlayani oleh satuan pendidikan PAUD formal, terutama di wilayah dengan kondisi geografis tertentu serta keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini. Selain itu, faktor sosial ekonomi masyarakat, termasuk tingkat kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini, turut memengaruhi tingkat partisipasi anak dalam layanan PAUD.

Dari sisi internal, keterbatasan daya tampung satuan PAUD, khususnya PAUD negeri, serta distribusi pendidik PAUD yang belum merata menjadi tantangan dalam optimalisasi layanan. Di samping itu, dinamika data kependudukan dan pemutakhiran data sasaran usia PAUD turut berpengaruh terhadap perhitungan APM, sehingga berdampak pada capaian indikator.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Penurunan
Meningkatnya Akses Pendidikan	APM PAUD	90,90	92,78	1,88

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Penurunan
Meningkatnya Akses Pendidikan	APM PAUD	94,91	97,28	2,37

Berdasarkan hasil perbandingan kinerja indikator Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, realisasi APM PAUD pada Tahun 2025 sebesar 90,90%, mengalami penurunan sebesar 1,88 poin dibandingkan realisasi Tahun 2024 yang mencapai 92,78%. Meskipun secara realisasi menunjukkan peningkatan, tingkat capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 94,91% justru mengalami penurunan sebesar 2,37 poin dibandingkan capaian Tahun 2024 yang mencapai 97,28%.

Penurunan ini tidak semata-mata mencerminkan menurunnya akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini, tetapi lebih dipengaruhi oleh perubahan struktur jumlah penduduk usia PAUD sebagai basis perhitungan APM. Dinamika demografi tersebut berdampak pada pergeseran rasio antara jumlah peserta didik usia resmi PAUD dengan total penduduk usia 5-6 tahun.

Selain itu, terdapat peserta didik yang secara administratif masih bersekolah di PAUD namun berada di luar rentang usia APM, yaitu anak usia 6 tahun keatas. Kelompok peserta didik ini tetap terlayani dalam sistem Pendidikan Anak Usia Dini, namun tidak dihitung dalam perhitungan

APM PAUD, sehingga turut mempengaruhi penurunan nilai APM secara statistik.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Akses Pendidikan	APM PAUD	90,90	95,78	94,91

Berdasarkan tabel perbandingan, realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Tahun 2025 mencapai 90,90%, sementara target akhir Renstra ditetapkan sebesar 95,78%, sehingga tingkat ketercapaian terhadap target akhir Renstra berada pada 94,91%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja indikator APM PAUD belum sepenuhnya mencapai target strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah, meskipun capaian yang diperoleh relatif tinggi dan mendekati target akhir.

Belum tercapainya target akhir Renstra APM PAUD dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural dan kontekstual. Dari sisi akses, masih terdapat keterbatasan jangkauan layanan PAUD di beberapa wilayah, khususnya pada daerah dengan sebaran penduduk yang terpencar. Selain itu, faktor sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kesadaran orang tua terhadap urgensi pendidikan anak usia dini turut memengaruhi partisipasi anak usia PAUD dalam layanan pendidikan formal.

Di sisi lain, dinamika data kependudukan dan perubahan jumlah anak usia PAUD setiap tahun berdampak pada besaran sasaran layanan, sehingga memengaruhi perhitungan APM. Keterbatasan daya tampung satuan PAUD serta distribusi pendidik yang belum sepenuhnya

merata juga menjadi tantangan dalam mengoptimalkan capaian indikator hingga mencapai target akhir Renstra.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata Provinsi	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Akses Pendidikan	APM PAUD	90,90	Tidak bisa dibandingkan	-

Capaian APM PAUD daerah tidak bisa dibandingkan dengan APM PAUD propinsi hal ini dikarenakan adanya perbedaaan skala dan populasi serta perbedaan kebijakan antara propinsi dan daerah.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Tahun 2025 dengan realisasi sebesar 90,90% dan tingkat capaian 94,91% merupakan hasil pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis meningkatnya akses pendidikan, sebagaimana tergambar dalam pohon kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Hal ini sejalan dengan sasaran program meningkatnya partisipasi PAUD, dengan indikator kinerja APM PAUD sebagai tolok ukur keberhasilannya. Dengan demikian, capaian APM PAUD tahun 2025 mencerminkan komitmen Dinas Pendidikan dalam memperluas akses layanan pendidikan anak usia dini.

Dalam pencapaian sasaran kinerja APM PAUD didukung oleh kegiatan :

1. Dalam rangka meningkatkan angka partisipasi siswa PAUD juga upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka, Dinas Pendidikan memberikan bantuan perlengkapan sekolah pada siswa dari keluarga tidak mampu sebanyak 1800 orang dengan anggaran Rp. 220.000.000,-.
2. Penyaluran Dana BOP PAUD sebanyak Rp. 16.999.470.000,- untuk 832 Lembaga PAUD.

Keberhasilan capaian APM PAUD juga didorong oleh penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait turut berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi anak usia dini. Dimana peran Bunda PAUD sangat aktif dalam mensosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat.

Dengan demikian, capaian APM PAUD Tahun 2025 merupakan hasil dari kombinasi antara efektivitas pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi pengelolaan data.

Upaya yang akan dilakukan Dinas Pendidikan terhadap peningkatan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD pada tahun 2026 diantaranya:

1. Pemberian bantuan perlengkapan peserta didik dari keluarga tidak mampu sebanyak 2000 orang yang tersebar di 824 Satuan Pendidikan.
2. Meningkatkan pengelolaan dan pemutahiran data pendidikan jenjang PAUD melalui verval dapodik.
3. Menyalurkan Biaya Operasional Sekolah jenjang PAUD ke 817 satuan pendidikan anak usia dini.

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendidikan.	Bidang PAUD	17.196.939.350

7. Efisiensi anggaran

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator APM PAUD pada sasaran meningkatnya akses pendidikan tidak ada karena IKU hanya mencapai 94,95 %.

IKU 2

APM SD/MI

Meningkatnya Akses Pendidikan

Capaian Tahun 2025
99,46%

Target	Realisasi
91,28%	90,79%

Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra
91,54%	91,30%

Capaian Tahun 2024	Realisasi Provinsi
100,32%	98,02%

Faktor yang Mempengaruhi

- Pemutakhiran dan sinkronisasi data peserta didik
- Pemberian bantuan perlengkapan peserta didik sebanyak 269 orang
- Penyaluran Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD untuk 671 SD

Program yang Mendukung :

Program Pengelolaan Pendidikan

Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI pada sasaran meningkatnya akses pendidikan tidak ada karena IKU hanya mencapai 99,46%.

Tren APM SD/MI

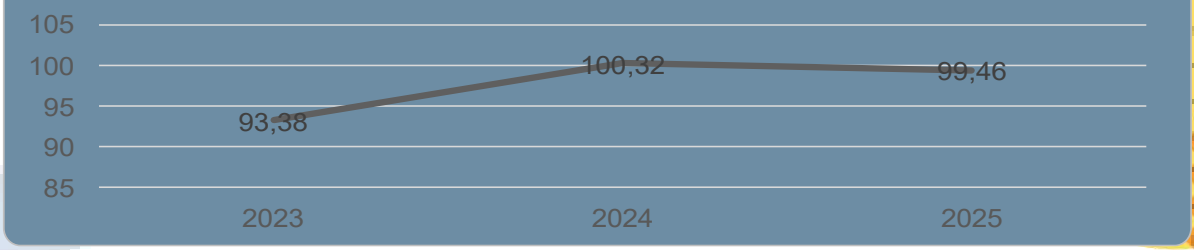

INDIKATOR 2

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Akses Pendidikan	APM SD/MI	91,28	90,79	99,46

Capaian kinerja indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 90,79% dari target yang ditetapkan sebesar 91,28%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 99,46%. Capaian ini mencerminkan bahwa sasaran strategis meningkatnya akses pendidikan dasar secara umum telah tercapai dengan sangat baik, meskipun target belum sepenuhnya terpenuhi.

Tingginya capaian APM SD/MI didukung oleh ketersediaan dan pemerataan satuan pendidikan dasar yang relatif memadai di Kabupaten Majalengka, serta pelaksanaan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar yang telah berjalan secara konsisten. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025, seperti pengelolaan pendidikan dasar, pemenuhan layanan pendidikan, serta pembinaan satuan pendidikan, berkontribusi positif terhadap keberlangsungan partisipasi peserta didik usia sekolah dasar.

Namun demikian, belum tercapainya target secara optimal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari sisi eksternal, masih terdapat sebagian kecil anak usia SD/MI yang belum terlayani pada jenjang pendidikan yang sesuai, antara lain karena perpindahan domisili, kondisi sosial ekonomi keluarga, serta faktor geografis di wilayah tertentu. Selain itu, dinamika data kependudukan dan perubahan jumlah

anak usia sekolah dasar turut memengaruhi besaran sasaran APM, sehingga berdampak pada perhitungan capaian indikator.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Penurunan
Meningkatnya Akses Pendidikan	APM SD/MI	90,79	91,54	0,57

Realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Tahun 2025 sebesar 90,79% mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai 91,54%. Penurunan ini tidak semata-mata mencerminkan menurunnya akses layanan pendidikan dasar, tetapi lebih dipengaruhi oleh perubahan struktur jumlah penduduk usia sekolah dasar sebagai basis perhitungan APM. Dinamika demografi tersebut berdampak pada pergeseran rasio antara jumlah peserta didik usia resmi SD/MI dengan total penduduk usia 7–12 tahun.

Selain itu, terdapat peserta didik yang secara administratif masih bersekolah di SD/MI namun berada di luar rentang usia APM, yaitu anak usia 6 tahun maupun 13 tahun. Kelompok peserta didik ini tetap terlayani dalam sistem pendidikan dasar, namun tidak dihitung dalam perhitungan APM SD/MI, sehingga turut mempengaruhi penurunan nilai APM secara statistik.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Penurunan
Meningkatnya Akses Pendidikan	APM SD/MI	99,46	100,32	-0,86

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Tahun 2025 sebesar 99,46% mengalami penurunan dibandingkan capaian Tahun 2024 yang mencapai 100,32%. Penurunan capaian ini tidak secara langsung menunjukkan penurunan kinerja penyelenggaraan pendidikan dasar, melainkan dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk usia sekolah dasar sebagai pembagi dalam perhitungan capaian indikator. Dinamika demografi tersebut menyebabkan rasio realisasi terhadap target menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, keberadaan peserta didik yang masih bersekolah di SD/MI namun berada di luar batas usia APM, yaitu anak usia di 6 tahun dan 12 tahun, turut mempengaruhi nilai capaian indikator. Meskipun peserta didik tersebut tetap memperoleh layanan pendidikan secara optimal, mereka tidak termasuk dalam perhitungan APM SD/MI, sehingga berdampak pada penurunan capaian secara statistik.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Akses Pendidikan	APM SD/MI	90,79	91,30	99,44

Berdasarkan perbandingan kinerja indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, realisasi Tahun 2025 tercatat sebesar 90,97%, sementara target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis sebesar 91,30%, sehingga tingkat ketercapaian mencapai 99,44%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja akses pendidikan dasar telah berada pada kategori sangat baik dan mendekati target strategis yang ditetapkan, meskipun belum sepenuhnya tercapai.

8. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata Provinsi	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Akses Pendidikan	APM SD/MI	90,79	98,02	7,23

Berdasarkan hasil perbandingan, realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Majalengka Tahun 2025 sebesar 90,79%, masih berada di bawah rata-rata/standar Provinsi yang mencapai 98,02%, dengan selisih sebesar 7,23 poin. Perbedaan ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar di Kabupaten Majalengka belum sepenuhnya setara dengan capaian rata-rata Provinsi, meskipun secara umum kinerja daerah telah berada pada kategori baik dan mendekati target yang ditetapkan dalam perencanaan daerah.

Kesenjangan capaian tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural dan kontekstual. Dari sisi kewilayahan, karakteristik geografis serta sebaran penduduk di beberapa wilayah menyebabkan akses terhadap satuan pendidikan SD/MI belum sepenuhnya merata. Selain itu, kondisi sosial ekonomi sebagian masyarakat turut memengaruhi keberlanjutan partisipasi anak usia SD/MI, terutama pada keluarga dengan tingkat mobilitas tinggi atau kerentanan ekonomi tertentu. Faktor ini berdampak pada masih adanya anak usia sekolah dasar yang belum terlayani secara optimal pada jenjang pendidikan yang sesuai.

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) MENURUT PROPINSI DAN JENJANG PENDIDIKAN

38 Provinsi	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan		
	SD/sederajat	SMP/sederajat	SM/sederajat
	2025	2025	2025
ACEH	96,32	81,37	70,36
SUMATERA UTARA	95,99	77,41	70,4
SUMATERA BARAT	97,06	82,7	71,57
RIAU	97,54	81,4	65,22
JAMBI	97,02	78,47	63,05
SUMATERA SELATAN	95,98	74,27	63,08
BENGKULU	96,12	78,83	69,32
LAMPUNG	97,64	78,47	67,22
KEP. BANGKA BELITUNG	97	74,06	65,94
KEP. RIAU	98,2	83,55	76,54
DKI JAKARTA	98,47	87,55	69,9
JAWA BARAT	98,02	83,84	67,33
JAWA TENGAH	97,21	80,29	67,81
DI YOGYAKARTA	98,77	88,67	78,42

Sumber Data: BPS Indonesia Tahun 2025

Disisi lain, rata-rata/standar Provinsi umumnya ditopang oleh daerah dengan tingkat urbanisasi lebih tinggi, infrastruktur pendidikan yang lebih lengkap, serta dukungan program afirmasi yang relatif lebih kuat. Kondisi tersebut turut mendorong tingginya capaian APM SD/MI di tingkat Provinsi dibandingkan dengan capaian Kabupaten Majalengka. Selain itu, perbedaan dalam akurasi dan dinamika data kependudukan antar daerah juga berpengaruh terhadap hasil perhitungan indikator.

9. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya.

10. Implementasi sasaran strategis Dinas Pendidikan, yaitu meningkatnya akses pendidikan. Dalam kerangka tersebut, salah satu sasaran program yang ditetapkan adalah meningkatnya partisipasi pendidikan dasar (SD) dengan indikator kinerja APM SD/MI sebagai tolok ukur keberhasilannya. Melalui penguatan akses, pemerataan layanan, serta pengendalian anak tidak sekolah.

    Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung diantaranya:

    1. Pemutakhiran dan sinkronisasi data peserta didik secara berkala melalui aplikasi Dapodik diikuti oleh semua operator dapodik jenjang SD.
    2. Pemberian bantuan perlengkapan peserta didik sebanyak 269 orang dengan anggaran Rp.439.717.500,-.
    3. Penyaluran Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sebesar Rp. 106.424.210.000 untuk 671 SD.

Verval Dapodik Jenjang SD

Upaya yang akan dilakukan Dinas Pendidikan terhadap peningkatan capaian angka partisipasi jenjang SD pada tahun 2026 diantaranya:

1. Pemberian bantuan perlengkapan peserta didik sebanyak 211 orang.
2. Penyaluran dana Biaya Operasional Sekolah sebanyak 671 sekolah.
3. Verifikasi dan validasi data peserta didik jenjang SD secara berkala melalui aplikasi Dapodik untuk mengakurasikan pengusulan data penerima bantuan bagi siswa dari keluarga miskin.

11. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Pendidikan.	Bidang SD	106.863.790.700

12. Efisiensi anggaran

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI pada sasaran meningkatnya akses pendidikan tidak ada karena IKU hanya mencapai 99,46%.

IKU 3

APM SMP/MTs

Meningkatnya Akses Pendidikan

Capaian Tahun 2025
97,36%

Target	Realisasi
88,28%	85,92%

Realisasi Tahun 2024
94,44%

Target Akhir Renstra
88,28%

Capaian Tahun 2024
107,14%

Realisasi Provinsi/Pusat
83.84%

Faktor yang Mempengaruhi

- Menyalurkan bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu
- Pemutakhiran dan Validasi Data Pendidikan
- Penyaluran Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjag SMP sebesar untuk 125 SMP.

Program yang Mendukung :

Program Pengelolaan Pendidikan

Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs pada sasaran Meningkatnya akses pendidikan tidak ada karena IKU hanya mencapai 97,36%.

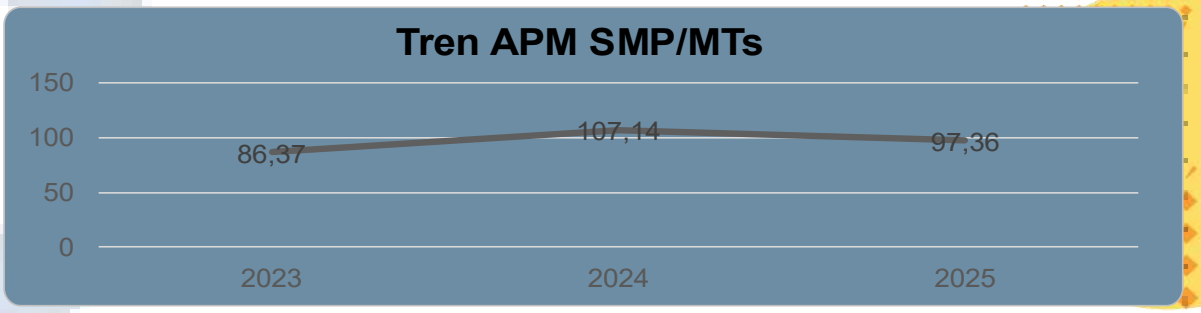

INDIKATOR 3

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Akses Pendidikan	APM SMP/MTs	88,28	85,92	97,36

Pada Tahun 2025, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sebagai indikator sasaran strategis meningkatnya akses pendidikan ditetapkan dengan target sebesar 88,28%. Realisasi yang dicapai sebesar 85,92%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 97,36%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendidikan dalam mendorong partisipasi murni pendidikan menengah pertama berada pada kategori cukup tinggi, meskipun belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan.

Belum tercapainya target APM SMP/MTs tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Transisi peserta didik dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs masih menjadi tantangan utama, terutama bagi anak usia 13–15 tahun yang menghadapi kendala sosial ekonomi, jarak tempuh sekolah, serta preferensi sebagian masyarakat terhadap pilihan pendidikan nonformal atau penundaan melanjutkan sekolah. Selain itu, dinamika data kependudukan turut memengaruhi akurasi sasaran usia sekolah, sehingga berdampak pada besaran APM yang dihitung dalam tahun berjalan.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Penurunan
Meningkatnya Akses Pendidikan	APM SMP/MTs	85,92	94,44	8,52

Realisasi APM SMP/MTs Tahun 2025 sebesar 85,92% menurun dibandingkan Tahun 2024 sebesar 94,44%. Penurunan ini dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk usia sekolah sebagai basis perhitungan APM serta adanya peserta didik yang masih bersekolah di SMP/MTs namun berada di luar rentang usia APM, yaitu usia di atas 15 tahun maupun di bawah 13 tahun. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan nilai APM secara statistik dan tidak mencerminkan penurunan akses layanan pendidikan secara substantif.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Penurunan
Meningkatnya Akses Pendidikan	APM SMP/MTs	97,36	107,14	9,78

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Tahun 2025 sebesar 97,36% mengalami penurunan dibandingkan capaian Tahun 2024 yang mencapai 107,14%, atau turun sebesar 9,78 poin. Penurunan capaian ini dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk usia sekolah sebagai dasar perhitungan indikator serta masih adanya peserta didik yang bersekolah di SMP/MTs namun berada di luar rentang usia APM, yaitu di atas 15 tahun maupun di bawah 13 tahun. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan capaian secara statistik, meskipun layanan pendidikan

jenjang SMP/MTs tetap berjalan dan akses pendidikan tetap terjaga.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Akses Pendidikan	APM SMP/MTs	85,92	88,28	97,33

Berdasarkan tabel perbandingan, realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Tahun 2025 tercatat sebesar 85,92%, sementara target akhir Renstra ditetapkan sebesar 88,28%. Dengan demikian, tingkat ketercapaian kinerja mencapai 97,33%, yang menunjukkan bahwa target strategis meningkatnya akses pendidikan pada jenjang SMP/MTs belum sepenuhnya tercapai, meskipun secara kinerja telah mendekati target yang direncanakan. Selisih sebesar 2,36 poin mencerminkan masih adanya sebagian penduduk usia 13–15 tahun yang belum terlayani secara optimal dalam sistem pendidikan formal.

Belum tercapainya target akhir Renstra tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama pada aspek kesinambungan layanan pendidikan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Transisi peserta didik dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs masih menghadapi kendala, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses geografis, keterjangkauan sarana pendidikan, serta meningkatnya potensi putus sekolah pada usia remaja awal. Selain itu, dinamika kependudukan seperti perpindahan domisili, perubahan status sekolah (formal ke nonformal), serta pembaruan data usia sekolah turut memengaruhi capaian APM sehingga realisasi belum mampu mengejar target Renstra secara penuh.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata Provinsi	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Akses Pendidikan	APM SMP/MTs	85,92	83.84	2,08

Berdasarkan tabel perbandingan, realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Majalengka Tahun 2025 tercatat sebesar 85,92%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat sebesar 83,84%, dengan selisih positif 2,08 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa akses pendidikan jenjang SMP/MTs di Kabupaten Majalengka telah melampaui standar rata-rata Provinsi, sehingga secara relatif kinerja Dinas Pendidikan dalam memperluas partisipasi pendidikan menengah pertama berada pada kategori baik.

Keunggulan capaian tersebut dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan daerah dalam menjaga keberlanjutan partisipasi peserta didik usia 13–15 tahun, khususnya melalui penguatan transisi dari SD/MI ke SMP/MTs, pemerataan layanan pendidikan, serta dukungan terhadap peserta didik dari keluarga kurang mampu. Selain itu, ketersediaan satuan pendidikan SMP/MTs yang relatif merata dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar sembilan tahun turut berkontribusi positif terhadap tingginya realisasi APM dibandingkan rata-rata Provinsi.

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) MENURUT PROPINSI DAN JENJANG PENDIDIKAN

38 Provinsi	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan		
	SD/sederajat	SMP/sederajat	SM/sederajat
	2025	2025	2025
ACEH	96,32	81,37	70,36
SUMATERA UTARA	95,99	77,41	70,4
SUMATERA BARAT	97,06	82,7	71,57
RIAU	97,54	81,4	65,22
JAMBI	97,02	78,47	63,05
SUMATERA SELATAN	95,98	74,27	63,08
BENGKULU	96,12	78,83	69,32
LAMPUNG	97,64	78,47	67,22
KEP. BANGKA BELITUNG	97	74,06	65,94
KEP. RIAU	98,2	83,55	76,54
DKI JAKARTA	98,47	87,55	69,9
JAWA BARAT	98,02	83,84	67,33
JAWA TENGAH	97,21	80,29	67,81
DI YOGYAKARTA	98,77	88,67	78,42
JAWA TIMUR	98,22	84,49	70,64

Sumber data : BPS Indonesia Tahun 2025

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

   Dalam rangka mengimplementasikan sasaran strategis Dinas Pendidikan yaitu meningkatnya akses pendidikan, dengan sasaran program meningkatnya partisipasi SMP dengan indikator APM SMP/MTs, Dinas Pendidikan Tahun 2025 telah melakukan berbagai upaya, antara lain :

   1. Untuk menjaga keberlanjutan partisipasi peserta didik usia 13–15 tahun, Dinas Pendidikan menyalurkan bantuan pendidikan sebesar Rp.313.600.000,- bagi

peserta didik dari keluarga kurang mampu sebanyak 200 orang.

2. Pemutakhiran dan Validasi Data Pendidikan

   Dalam rangka meningkatkan akurasi pengukuran APM SMP/MTs, Dinas Pendidikan melaksanakan pemutakhiran dan validasi data peserta didik secara berkala. Kegiatan ini mencakup sinkronisasi data usia sekolah, status kepesertaan pendidikan, serta koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan data partisipasi pendidikan mencerminkan kondisi riil di lapangan. Termasuk validasi data siswa penerima PIP

3. Penyaluran Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjag SMP sebesar Rp. 47.114.480.000,- untuk 125 SMP.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pendidikan, khususnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs serta mutu layanan pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka pada Tahun 2026 akan melanjutkan dan memperkuat berbagai upaya strategis melalui program dan kegiatan yang terarah. Upaya tersebut antara lain :

1. Pemberian bantuan perlengkapan peserta didik, khususnya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, guna mengurangi hambatan ekonomi dalam mengikuti pendidikan secara berkelanjutan.
2. Penyaluran Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMP untuk 124 SMP.
3. Verifikasi dan validasi data peserta didik jenjang SMP secara berkala melalui aplikasi Dapodik untuk mengakurasikan pengusulan data penerima bantuan bagi siswa dari keluarga miskin.

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Pengelolaan Pendidikan	Bidang SMP	47.410.775.586

7. Efisiensi anggaran

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs pada sasaran Meningkatnya akses pendidikan tidak ada karena IKU hanya mencapai 97,36%.

IKU 4

APK Kesetaraan

Meningkatnya Akses Pendidikan

Capaian Tahun 2025

120,60 %

Target	Realisasi
36,64%	44,19%

Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra
34,64%	38,86%

Capaian Tahun 2024	Realisasi Provinsi/Pusat
71,22%	-

Faktor yang Mempengaruhi

- Optimalisasi data peserta data pendidik kesetaraan
- Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Kesetaraan untuk 33 Lembaga/PKBM

Program yang Mendukung :

Program Pengelolaan Pendidikan

Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan pada sasaran meningkatnya akses pendidikan yaitu 0,51% atau sebesar Rp.61.724.925, - dari pagu anggaran Rp.11.995.789.000, - dengan realisasi Rp.11.934.064.075, -

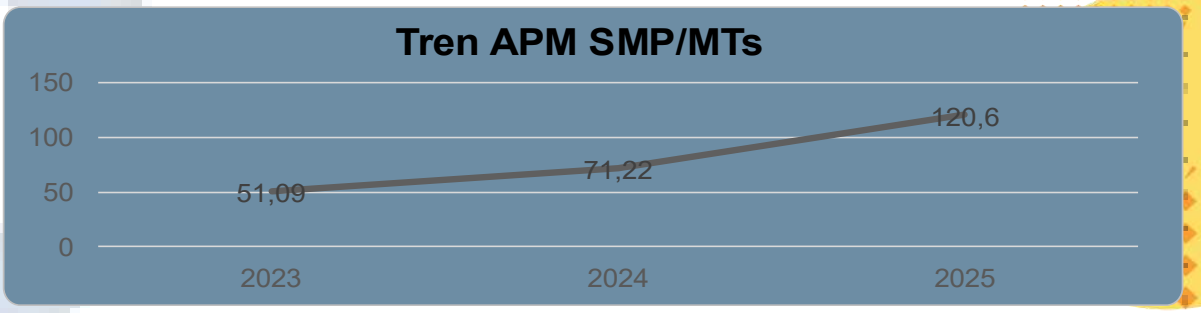

INDIKATOR 4

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya akses pendidikan	APK Kesetaraan	36,64	44,19	120,60

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan Tahun 2025 pada sasaran strategis meningkatnya akses pendidikan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 36,64%, realisasi yang dicapai mencapai 44,19%, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 120,60%. Hal ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan kesetaraan mampu menjangkau peserta didik melebihi target yang direncanakan.

Tercapainya kinerja di atas target tersebut mengindikasikan meningkatnya minat dan partisipasi masyarakat, khususnya kelompok usia di luar sekolah formal, untuk mengikuti layanan pendidikan kesetaraan. Selain itu, efektivitas pelaksanaan program pendidikan nonformal, perluasan akses layanan kesetaraan, serta dukungan kebijakan dan fasilitasi oleh Dinas Pendidikan berkontribusi signifikan terhadap tingginya realisasi APK Kesetaraan. Capaian ini menjadi bukti bahwa pendidikan kesetaraan berperan strategis dalam memperluas akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan layanan pendidikan di Kabupaten Majalengka.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LPPD Tahun 2024 Kabupaten Majalengka urusan pendidikan oleh BPKP Propinsi Jawa Barat bahwasannya capaian kinerja tingkat

partisipasi warga usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan ada perubahan capaian, yang semula capainnya sebesar 52,99% menjadi 34,64%. Hasil perhitungan tersebut berpedoman pada Juknis Penyusunan LPPD tahun 2024 yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan
Meningkatnya akses pendidikan	APK Kesetaraan	44,19	34,64	9,55

Perbadingan, kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan pada Tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Realisasi Tahun 2025 mencapai 44,19%, meningkat dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar 36,64%, atau mengalami kenaikan sebesar 9,55 poin. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan akses dan partisipasi masyarakat terhadap layanan pendidikan kesetaraan, yang didukung oleh upaya Dinas Pendidikan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan nonformal, meningkatkan sosialisasi program kesetaraan, serta memperkuat fasilitasi bagi warga belajar yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Peningkatan
Meningkatnya akses pendidikan	APK Kesetaraan	120,60	71,22	49,38

Berdasarkan tabel perbandingan, capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan pada sasaran strategis

meningkatnya akses pendidikan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Pada Tahun 2025, capaian kinerja tercatat sebesar 120,60%, meningkat tajam dibandingkan capaian Tahun 2024 yang sebesar 71,22%, atau mengalami kenaikan sebesar 49,38 poin. Peningkatan capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan kesetaraan pada Tahun 2025 berjalan jauh lebih efektif dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan capaian kinerja ini mencerminkan keberhasilan Dinas Pendidikan dalam memperluas akses layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat usia sekolah dan usia dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Optimalisasi penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal, peningkatan sosialisasi program kesetaraan, serta dukungan kebijakan dan fasilitasi terhadap warga belajar berkontribusi signifikan terhadap lonjakan capaian kinerja. Selain itu, perbaikan pendataan dan penajaman sasaran program turut memperkuat pencapaian APK Kesetaraan, sehingga realisasi kinerja pada Tahun 2025 mampu melampaui target yang telah ditetapkan dan menunjukkan kinerja yang sangat baik.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya akses pendidikan	APK Kesetaraan	44,19	38,86	113,7

Berdasarkan tabel perbandingan, realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan Tahun 2025 pada sasaran strategis meningkatnya akses pendidikan tercatat sebesar 44,19%, melampaui target akhir Renstra sebesar 38,86%. Dengan demikian, hasil perbandingan menunjukkan tingkat

ketercapaian kinerja sebesar 113,70%, yang menandakan bahwa target Renstra telah tercapai bahkan terlampaui.

Tercapainya kinerja di atas target akhir Renstra tersebut mencerminkan keberhasilan kebijakan dan program pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dalam memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Peningkatan partisipasi warga belajar didukung oleh optimalisasi penyelenggaraan pendidikan nonformal, perluasan jangkauan layanan kesetaraan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai sarana peningkatan kualitas hidup.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata Provinsi/ Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya akses pendidikan	APK Kesetaraan	44,19	Tidak bisa dibandingkan	-

Capaian APK Angka Partisipasi Kasar (APK) kesetaraan di tingkat provinsi tidak dapat langsung dibandingkan dengan capaian APK Nonformal/kesetaraan di tingkat daerah dikarenakan karena adanya perbedaan ketersediaan data, metodologi penghitungan, serta ruang lingkup pelaporan indikator kebijakan dan prioritas pendidikan antara propinsi dan daerah berbeda, juga adanya perbedaan skala dan populasi yang berbeda dapat berdampak signifikan pada angka partisipasi kesetaraan.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan Tahun 2025 merupakan bagian dari implementasi sasaran strategis Dinas Pendidikan yaitu meningkatnya akses pendidikan, dengan sasaran program meningkatnya partisipasi pendidikan kesetaraan dan indikator kinerjanya APK Kesetaraan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk tercapainya kinerja APK Kesetaraan, antara lain :

1. Optimalisasi data peserta data pendidik kesetaraan melalui verval dapodik Kesetaraan.
2. Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Kesetaraan sebesar Rp. 11.426.510.000,- untuk 33 Lembaga/PKBM

Verval Dapadik Kesetaraan

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Angka Partisipasi Kesetaraan pada Tahun 2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka akan melaksanakan berbagai upaya strategis yang terintegrasi dan berkelanjutan, antara lain :

1. Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Bagi Peserta Didik Usia 24 Tahun Keatas
2. Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Kesetaraan untuk 33 Lembaga/PKBM

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Pengelolaan Pendidikan	Bidang PAUD DIKMAS	11.365.094.600

7. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%.

   Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan pada sasaran meningkatnya akses pendidikan yaitu 0,54% atau sebesar Rp. 61.415.400,- dari pagu anggaran Rp. 11.426.510.000,- dengan realisasi Rp. 11.365.094.600,-

SASARAN 2

MENINGKATNYA MUTU PENDIDIKAN

Untuk menjawab isu strategis Meningkatnya kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan meningkatnya pembangunan manusia. Sasaran meningkatnya mutu pendidikan merupakan bagian integral dari implementasi sasaran strategis Dinas Pendidikan yang selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Majalengka, yaitu meningkatnya kualitas pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan dimaknai sebagai upaya sistematis untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang berkualitas, efektif, dan berkelanjutan sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, serta memiliki daya saing.

Melalui peningkatan indikator kinerja seperti Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Dinas Pendidikan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hasil belajar dan capaian pembangunan manusia.

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah rata-rata lama sekolah yang diharapkan akan ditempuh oleh anak usia 7 tahun ke atas berdasarkan kondisi partisipasi sekolah pada tahun berjalan. HLS menggambarkan peluang penduduk untuk mengakses pendidikan dalam jangka waktu yang lebih panjang dan menjadi salah satu indikator pembangunan manusia pada dimensi pengetahuan.

Formulasi HLS

$$HLS_a^t = \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

- HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada usia *a* tahun di tahun *t*
- E_i^t = Jumlah penduduk usia *i* yang sedang bersekolah
- P_i^t = Jumlah penduduk usia *i*
- a = Usia awal (umumnya 7 tahun)
- n = Usia maksimum yang diperhitungkan

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. RLS menggambarkan capaian aktual tingkat pendidikan masyarakat dan menjadi salah satu indikator pembangunan manusia pada dimensi pengetahuan.

Formulasi RLS

$$RLS = \frac{(L_i \times P_i)}{P_i}$$

Keterangan:

- RLS = Rata-Rata Lama Sekolah
- L_i = Lama sekolah yang ditamatkan pada jenjang pendidikan ke-*i*
- P_i = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas pada jenjang pendidikan ke-*i*

Data indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Perhitungan kedua indikator tersebut dilakukan berdasarkan metodologi statistik nasional yang terstandar dan menjadi bagian dari komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, Dinas Pendidikan menggunakan data publikasi BPS sebagai dasar pengukuran kinerja pada indikator HLS dan RLS dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan kinerja.

IKU 5

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Meningkatnya Mutu Pendidikan

Capaian Tahun 2025
101,54%

Target	Realisasi
12,31	12,50

Realisasi Tahun 2024 12,27%	Target Akhir Renstra 12,35%
Capaian Tahun 2024 99,92%	Realisasi Provinsi/Pusat 13,02

Faktor yang Mempengaruhi

- Koordinasi evaluasi sistem penerimaan murid baru (SPMB) dengan satuan pendidikan
- Pembangunan ruang kelas baru, sarana prasarana dan utilitas sekolah jenjang PAUD, SD dan SMP
- Rehabilitasi ruang kelas, sarana prasarana dan utilitas sekolah jenjang PAUD, SD dan SMP
- Berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan.
- Melaksanakan Gerakan Aksi Peningkatan Mutu Sekolah (GASPOL)
- Program KKO (Kelas Khusus Olahraga)

Program yang Mendukung :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) pada sasaran Meningkatnya Mutu Pendidikan yaitu 1,97% atau sebesar Rp.6.445.414.688,00, - dari pagu anggaran Rp.327.313.493.678, - dengan realisasi Rp. 320.868.078.990, -.

Tren HLS

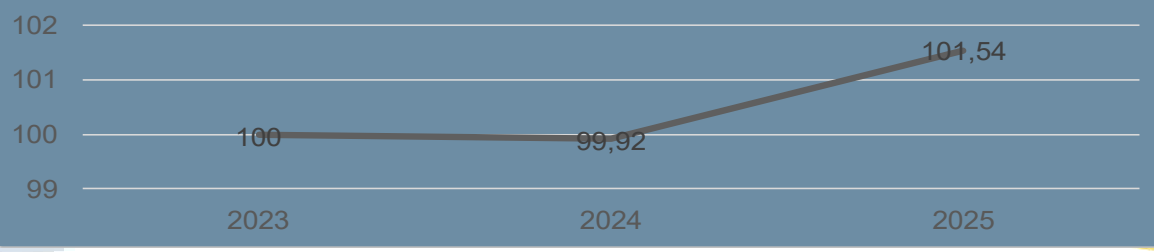

INDIKATOR 5

Harapan Lama Sekolah (HLS)

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya mutu pendidikan	HLS	12,31	12,50	101,54

Pada Tahun 2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka menetapkan indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan target 12,31 tahun. Realisasi yang dicapai sebesar 12,50 tahun, sehingga capaian kinerja mencapai 101,54%. Hasil ini menunjukkan bahwa sasaran strategis meningkatnya mutu pendidikan telah tercapai dengan baik.

Tercapainya target tersebut dipengaruhi oleh terjaganya akses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta meningkatnya keberlanjutan peserta didik untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dukungan program pendidikan nonformal dan pendidikan kesetaraan turut memperluas peluang masyarakat untuk tetap mengakses layanan pendidikan, yang secara agregat berdampak pada peningkatan nilai HLS.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan
Meningkatnya mutu pendidikan	HLS	12,50	12,27	0,23

Realisasi Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Majalengka Tahun 2025 mencapai 12,50 tahun, meningkat

0,23 tahun dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 12,27 tahun. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam akses dan keberlanjutan pendidikan, yang didukung oleh penguatan layanan pendidikan pada berbagai jenjang serta optimalisasi program pendidikan formal dan nonformal. Capaian tersebut mencerminkan semakin besarnya peluang penduduk usia sekolah untuk menempuh pendidikan yang lebih lama dan berkelanjutan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Peningkatan
Meningkatnya mutu pendidikan	HLS	101,54	99,92	1,62

Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2025 mencapai 101,54%, meningkat dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 99,92%. Peningkatan capaian ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2025 target HLS tidak hanya berhasil dipenuhi, tetapi telah melampaui target yang ditetapkan, berbeda dengan Tahun 2024 yang masih berada sedikit di bawah target. Kondisi tersebut mencerminkan adanya perbaikan efektivitas kebijakan dan program pendidikan yang berdampak langsung pada meningkatnya peluang penduduk usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Keberhasilan pencapaian HLS Tahun 2025 dipengaruhi oleh penguatan akses dan kesinambungan layanan pendidikan, termasuk stabilnya angka partisipasi pada jenjang menengah dan meningkatnya kontribusi pendidikan nonformal dan kesetaraan. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, dukungan lintas sektor, serta optimalisasi program wajib belajar turut mempercepat pencapaian target.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya mutu pendidikan	HLS	12,50	12,35	101,22

Perbandingan realisasi Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2025 sebesar 12,50 tahun dengan Target Akhir Renstra sebesar 12,35 tahun menunjukkan hasil perbandingan 101,22%, yang berarti target strategis telah tercapai dan melampaui ketentuan Renstra.

Keberhasilan pencapaian HLS tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya keberlanjutan pendidikan pada jenjang menengah, kontribusi pendidikan nonformal dan kesetaraan, serta konsistensi pelaksanaan program pendidikan yang berorientasi pada perluasan akses dan mutu layanan. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan dukungan kebijakan daerah turut memperkuat capaian HLS hingga melampaui target akhir Renstra

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata Provinsi	Hasil Perbandingan
Meningkatnya mutu pendidikan	HLS	12,50	13,02	0,52

Realisasi Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Majalengka Tahun 2025 sebesar 12,50 tahun masih berada di bawah realisasi HLS Provinsi Jawa Barat yang mencapai 13,02 tahun, dengan selisih 0,52 tahun. Perbedaan ini menunjukkan bahwa secara regional, rata-rata penduduk

usia sekolah di Jawa Barat memiliki peluang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Majalengka. Kondisi tersebut mencerminkan adanya disparitas akses, kualitas layanan pendidikan, serta karakteristik sosial ekonomi antar wilayah di dalam provinsi.

Tabel CAPAIAN HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)
TAHUN 2025

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah (Tahun) 2025
1	JAWA BARAT	13,02
2	Bogor	12,76
3	Sukabumi	12,4
4	Cianjur	12,31
5	Bandung	12,99
6	Garut	12,43
7	Tasikmalaya	12,92
8	Ciamis	14,31
9	Kuningan	12,52
10	Cirebon	12,67
11	Majalengka	12,50
12	Sumedang	13,21
13	Indramayu	12,58

Sumber data : BPS Indonesia tahun 2025

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya.

   Capaian indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2025 yang melampaui target mencerminkan keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan yang sejalan dengan tujuan pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025, yaitu meningkatnya pembangunan manusia dengan sasaran meningkatnya kualitas pendidikan. Peningkatan HLS

menunjukkan semakin besarnya peluang penduduk untuk mengakses dan melanjutkan pendidikan secara berkelanjutan. Keberhasilan tersebut juga didukung oleh pencapaian sasaran program meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, yang memastikan terpenuhinya layanan dasar pendidikan secara merata dan berkualitas. Selain itu, sinergi program lintas sektor seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut meningkatkan kesehatan dan kesiapan belajar peserta didik, serta implementasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (KAIH) yang memperkuat pembentukan karakter dan budaya belajar positif. Dengan demikian, capaian HLS Tahun 2025 merefleksikan keterpaduan upaya peningkatan mutu layanan pendidikan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan manusia di Kabupaten Majalengka.

Kegiatan monitoring MBG

Sasaran program meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan diarahkan untuk menjamin terpenuhinya layanan pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan. Indikator capaian sasaran ini meliputi peningkatan nilai literasi dan numerasi peserta didik, terwujudnya iklim keamanan sekolah, iklim kebhinekaan, dan iklim inklusivitas, serta meningkatnya pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel pada jenjang SD dan SMP. Pencapaian indikator tersebut mencerminkan tidak

hanya peningkatan hasil belajar, tetapi juga kualitas lingkungan belajar dan tata kelola satuan pendidikan yang mendukung proses pembelajaran secara optimal.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut, Dinas Pendidikan pada tahun 2025 telah melakukan upaya antara lain :

1. Pendidikan jenjang SD

1.1. Menyelenggarakan pendampingan satuan pendidikan terkait pembinaan manajemen sekolah yang diikuti sebanyak 671 Sekolah Dasar. Dalam rangka penguatan program wajib belajar, Dinas pendidikan melaksanakan fasilitasi kelanjutan pendidikan bagi lulusan SD/MI melalui rapat koordinasi evaluasi sistem penerimaan murid baru (SPMB) dengan satuan pendidikan.

1.2. Pembangunan Ruang Kelas Baru sebanyak 2 Ruang dengan anggaran Rp. 396.674.000,- dan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan anggaran Rp. 2.065.243.000,- sebanyak 12 Paket.

Rehabilitasi SDN Bongas Kulon 3

1.3. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp.11.168.781.970,- sebanyak 105 ruang kelas, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan anggaran Rp. 59.585.000,- sebanyak 2 ruang. Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah anggaran Rp. 128.443.000,- sebanyak 1 ruang.

1.4. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi Guru jenjang SD melalui Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diikuti oleh 100 Kombel.

1.5. Pengadaan Mebel Sekolah sebanyak sebanyak 15 Paket dengan anggaran Rp.284.781.600,-

1.6. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan jenjang SD diikuti sebanyak 75 orang.

1.7 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar yang dikuti sebanyak 671 operator sekolah.

1.8 Dalam pencapaian indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2025 turut didukung oleh pelaksanaan kegiatan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa. Melalui fasilitasi lomba akademik dan nonakademik, pengembangan ekstrakurikuler, serta pembinaan talenta ini yang diikuti sebanyak 400 peserta dengan anggaran Rp.1.093.350.000,-

1.9 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik sebanyak 1.351.508.600 sebanyak 13 Unit.

1.10 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik dengan anggaran Rp. 927.227.090,-

1.11 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 6055 orang.

1.12 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran Rp. 84.450.000,-

Selain menyelenggarakan kegiatan berbasis anggaran, Dinas Pendidikan juga berupaya meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan lembaga perguruan tinggi di Kabupaten Majalengka dalam rangka menuju pendidikan bermutu.

Pada tahun 2025, Dinas Pendidikan memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta melalui kerja sama dengan PT Astra dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya di jenjang SD. Dukungan yang diberikan berupa bantuan multimedia pembelajaran diarahkan untuk mempercepat transformasi pembelajaran berbasis teknologi di satuan pendidikan. Kerja sama ini menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas layanan pendidikan, khususnya dalam mendorong pembelajaran yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan capaian kinerja pendidikan.

Penerimaan bantuan peralatan multi media pembelajaran dari PT ASTRA

Selain itu, dalam mengimplementasi penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPBA), Tahun 2025 Dinas Pendidikan telah melakukan rehabilitasi ruang kelas dampak kebakaran SD Bongas Kulon 3, pembangunan pagar dan senederan dampak pergerakan tanah SD Leuwikujang 3 kecamatan Leuwimunding .

Rehabilitasi SDN Bongas Kulon 3

2. Pendidikan Jenjang SMP

2.1. Dinas Pendidikan melaksanakan pembinaan melalui penguatan manajemen sekolah, peningkatan layanan pembelajaran, serta dorongan kepada sekolah agar lebih responsif terhadap kondisi sosial peserta didik.

2.2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebanyak 1 paket sebesar Rp.199.499.000,-, Pembangunan Ruang Kelas Baru sebanyak 1 Ruang sebesar Rp.199.746.000,-.

2.3. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebanyak 18 ruang dengan anggaran Rp.2.894.044.700,-. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebanyak 1 paket dengan anggaran Rp.199.218.000,-. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU sebanyak 2 ruang dengan anggaran Rp.399.302.000,-

2.4. Pengadaan Mebel Sekolah sebanyak 24 Paket dengan anggaran Rp.563.999.236,-

2.5. Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa, melalui fasilitasi lomba akademik dan nonakademik, pengembangan ekstrakurikuler, serta pembinaan talenta dengan diikuti 300 peserta dengan anggaran Rp.954.180.000,-

2.6. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 752 orang dengan anggaran Rp.1.685.400.000,-

2.7. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dikuti 30 orang dengan anggaran Rp.968.057.558,-

2.8. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah diikuti 124 peserta dengan anggaran Rp.23.750.000,-

2.9. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik sebanyak 16.023 Orang dengan anggaran Rp.220.279.500,-

2.10. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan sebanyak 300 orang dengan anggaran Rp.236.567.947,- melalui Gerakan Aksi Peningkatan Mutu Sekolah (GASPOL) pada satuan pendidikan merupakan inovasi Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

2.11. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik sebanyak 37 paket dengan anggaran Rp.523.913.550,-

2.12. Sebagai bentuk implementasi dari program kerja Kemendiksmen tentang pendidikan inklusi pada satuan pendidikan.

Pada tahun 2025 Dinas Pendidikan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Optimalisasi Pendidikan Sekolah Inklusi .

Selain menyelenggarakan kegiatan berbasis anggaran, Dinas Pendidikan pada jenjang pendidikan SMP melaksanakan Program KKO (Kelas Khusus Olahraga) adalah program yang dirancang untuk siswa yang memiliki bakat dan minat di bidang olahraga. Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa dalam prestasi olahraga sekaligus menjaga keseimbangan antara akademik dan fisik.

3. Pendidikan Anak Usia Dini
   3.1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD sebanyak 1 ruang dengan anggaran Rp.69.806.000,-
   3.2. Pengadaan Mebel PAUD sebanyak 36 paket dengan anggaran Rp. 354.645.000,-
   3.3. Pengadaan Perlengkapan PAUD sebanyak 52 paket dengan anggaran Rp.1.244.270.750,-
   3.4. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD sebanyak 1492 orang dengan anggaran Rp. 4.666.650.000,-
   3.5. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD sebanyak 382 Lembaga PAUD dengan anggaran Rp. 95.039.800,-

3.6. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD sebanyak 100 orang dengan anggaran Rp.12.600.000,-

3.7. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dengan anggaran Rp.49.550.000,-

3.8. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas Baru sebanyak 3 ruang dengan anggaran Rp.477.872.000,-

3.9. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD sebanyak 27182 siswa dengan anggaran Rp.273.129.846,-

3.10. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebanyak 8 ruang dengan anggaran Rp.866.266.978,-.

4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

   Pada tahun 2025 Dinas Pendidikan melakukan pendistribusian dan pemetaan kebutuhan pegawai (guru dan tenaga kependidikan) sebagai penunjang capaian kinerja Dinas Pendidikan.

Selain itu dalam upaya peningkatan akses pendidikan dan mutu pendidikan pada tahun 2025 Dinas Pendidikan melakukan koordinasi diantaranya :

1. Berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kunjungan Kerja Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

2. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait peningkatan partisipasi anak usia dini. Dimana peran Bunda PAUD sangat aktif dalam mensosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat. Sebagai bentuk implementasi program unggulan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang bertujuan untuk memperkuat fondasi pendidikan anak sejak usia dini.

Inovasi MOMAHE Layanan Inovasi BBPMP

Pada tahun selanjutnya, Dinas Pendidikan perlu memperkuat upaya peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) melalui :

a) Penguatan akses dan keberlanjutan pendidikan, khususnya pada jenjang menengah. Langkah yang dilakukan antara lain mendorong keberlanjutan lulusan SD/MI dan SMP/MTs ke jenjang yang lebih tinggi melalui penguatan layanan transisi pendidikan dan sosialisasi SPMB jenjang SD, SMP.

b) Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana penunjang pendidikan.
c) Peningkatan pendampingan peserta didik berisiko putus sekolah.
d) Optimalisasi peran satuan pendidikan nonformal dan kesetaraan sebagai alternatif layanan pendidikan.
e) Meningkatkan sinergi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait untuk mengatasi faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi keberlanjutan sekolah.
f) Memperkuat pemutakhiran dan pemanfaatan data pendidikan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
g) Penguatan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat.
h) Peningkatan kualitas layanan pendidikan.
i) Penyelenggaraan pendidikan inklusi jenjang SD dan SMP.
j) Meningkatkan sinergi pemanfaatan Program MBG dengan program pendidikan yang telah berjalan. Sinergi antara intervensi pendidikan dan dukungan pemenuhan gizi melalui program MBG menjadikan salah satu faktor pendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan berkelanjutan, sehingga mendorong peningkatan Harapan Lama Sekolah secara berkelanjutan.

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Pengelolaan Pendidikan	Bidang PAUD,SD dan SMP	320.212.191.479
2.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Bidang GTK	655.887.511

7. Efisiensi anggaran

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) pada sasaran Meningkatnya Mutu Pendidikan yaitu 1,97% atau sebesar Rp.6.445.414.688,00,- dari pagu anggaran Rp.327.313.493.678,00,- dengan realisasi Rp. 320.868.078.990,-.

IKU 6

Rata-rata Lama Sekolah

Meningkatnya Mutu Pendidikan

Capaian Tahun 2025

101,30%

Target	Realisasi
7,71	7,81

Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra
7,53	9,14

Capaian Tahun 2024	Realisasi Provinsi/Pusat
98,95%	6,5k

Faktor yang Mempengaruhi

- Pemberian insentif bagi tutor di PKBM sebanyak 130 tutor
- Penyaluran dana Biaya Operasional Sekolah untuk pendidikan kesetaraan sebanyak 33 PKBM
- Bimtek penguatan tata kelola pendidikan kesetaraan yang diikuti oleh 39 lembaga/PKBM.
- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang diikuti sebanyak 100 orang.
- Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan pihak pemerintah desa terkait Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket, A, Paket B dan Paket .

Program yang Mendukung :

Program Pengelolaan Pendidikan

Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Rata -rata Lama Sekolah (RLS) pada sasaran meningkatnya mutu pendidikan yaitu 0,054% atau sebesar Rp.309.525, - dari pagu anggaran Rp . 569.279.000, - dengan realisasi Rp . 568.969.475, -

Tren RLS

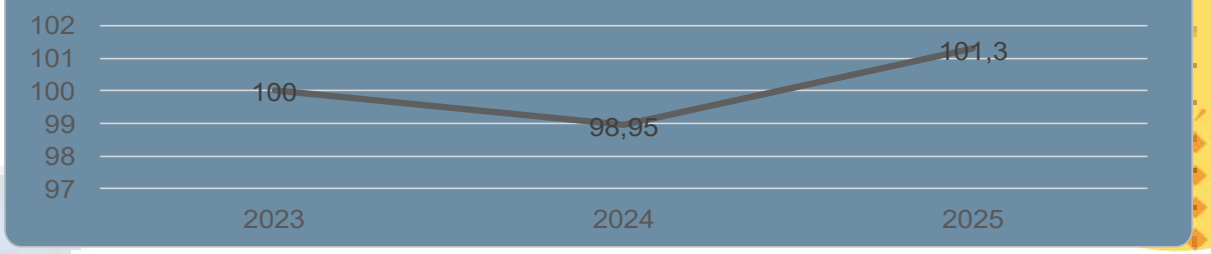

INDIKATOR 6

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Mutu Pendidikan	RLS	7,71	7,81	101,30

Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2025 sebesar 7,81 tahun telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 7,71 tahun, sehingga capaian kinerja mencapai 101,30%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa sasaran strategis peningkatan mutu pendidikan telah terlaksana dengan baik, yang tercermin dari meningkatnya rata-rata jenjang pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Majalengka.

Keberhasilan pencapaian RLS tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya keberlanjutan pendidikan pada jenjang menengah, kontribusi pendidikan nonformal dan kesetaraan, serta konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, dukungan kebijakan daerah dan sinergi lintas sektor turut memperkuat upaya peningkatan kualitas pendidikan.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan
Meningkatnya Mutu Pendidikan	RLS	7,81	7,53	0,28

Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sebesar 7,81 tahun mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 7,53 tahun, atau meningkat 0,28 tahun. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam mutu pendidikan, khususnya dalam mendorong penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Peningkatan RLS tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya akses dan keberlanjutan pendidikan pada jenjang menengah, kontribusi pendidikan nonformal dan kesetaraan bagi masyarakat dewasa, serta konsistensi pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, dukungan kebijakan daerah dan sinergi lintas sektor turut memperkuat upaya peningkatan jenjang pendidikan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan RLS Tahun 2025 mencerminkan efektivitas kebijakan dan program Dinas Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Peningkatan
Meningkatnya Mutu Pendidikan	RLS	101,30	98,95	2,35

Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2025 mencapai 101,30%, meningkat dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 98,95%, atau mengalami peningkatan 2,35 poin. Peningkatan capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kebijakan peningkatan mutu pendidikan berjalan lebih efektif, sehingga target RLS pada Tahun 2025 tidak hanya tercapai tetapi terlampaui.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Mutu Pendidikan	RLS	7,81	7,82	99,87

Perbandingan realisasi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2025 sebesar 7,81 tahun dengan Target Akhir Renstra sebesar 7,82 tahun menunjukkan hasil perbandingan 99,87%, yang berarti target strategis belum sepenuhnya tercapai, meskipun selisihnya sangat kecil.

Belum tercapainya target RLS secara penuh dipengaruhi oleh karakteristik indikator RLS yang bersifat akumulatif dan jangka panjang, sehingga peningkatannya sangat bergantung pada kesinambungan pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas. Selain itu, masih terdapat penduduk yang berhenti sekolah pada jenjang menengah serta keterbatasan peningkatan jenjang pendidikan pada kelompok usia dewasa dalam waktu singkat.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata Provinsi	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Mutu Pendidikan	RLS	7,81	9,14	1,33

Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Majalengka Tahun 2025 sebesar 7,81 tahun masih berada di bawah rata-rata Provinsi yang mencapai 9,14 tahun, dengan selisih 1,33 tahun. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi peningkatan mutu pendidikan

di tingkat kabupaten, rata-rata jenjang pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas masih lebih rendah dibandingkan capaian wilayah yang lebih luas.

Perbedaan capaian tersebut dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi masyarakat, struktur pendidikan penduduk usia dewasa yang bersifat akumulatif, serta masih terbatasnya peningkatan jenjang pendidikan pada kelompok usia produktif dalam waktu singkat.

Tabel Rata rata Lama Sekolah
Tahun 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
	2025
JAWA BARAT	9,14
Bogor	8,72
Sukabumi	7,63
Cianjur	7,62
Bandung	9,4
Garut	7,86
Tasikmalaya	7,98
Ciamis	8,23
Kuningan	7,91
Cirebon	7,88
Majalengka	7,81
Sumedang	8,92
Indramayu	7,06
Subang	7,68
Purwakarta	8,37
Karawang	8,31

Sumber data : BPS Indonesia tahun 2025

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

Keberhasilan pencapaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2025 sebagai bagian dari tujuan pembangunan manusia Kabupaten Majalengka dipengaruhi oleh penguatan mutu layanan pendidikan yang berkelanjutan. RLS mencerminkan capaian aktual tingkat pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas, sehingga peningkatannya menunjukkan semakin baiknya kualitas layanan pendidikan yang mendorong masyarakat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Capaian ini selaras dengan sasaran strategis Dinas Pendidikan yaitu meningkatnya mutu pendidikan.

Dalam mendukung pencapaian tersebut, Dinas Pendidikan melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Penyaluran dana Biaya Operasional Sekolah untuk pendidikan kesetaraan sebanyak 33 PKBM.
2. Pemberian insentif bagi tutor di PKBM sebanyak 130 tutor.
3. Pembinaan kelembagaan dan manajemen pendidikan kesetaraan melalui bimtek penguatan tata kelola pendidikan kesetaraan yang diikuti oleh 39 lembaga/PKBM.
4. Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan pihak pemerintah desa terkait Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket, A, Paket B dan Paket C untuk Peserta Didik Usia 25 Tahun Ke Atas melalui Dana Desa.
5. Penguatan program pendidikan nonformal dan kesetaraan melalui Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang diikuti sebanyak 100 orang.

Selain melaksanakan kegiatan berbasis anggaran, dalam upaya meningkatkan capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Majalengka, Dinas Pendidikan menginisiasi inovasi capaian Akselerasi Rata-Rata Lama Sekolah (AKSI RAMAH). Inovasi ini dirancang sebagai langkah strategis untuk mencegah anak usia sekolah dari risiko putus sekolah serta mendorong warga usia produktif agar melanjutkan pendidikan melalui program kesetaraan maupun pendidikan tinggi.

Melalui AKSI RAMAH, Dinas Pendidikan juga memperluas akses pembiayaan pendidikan dengan mengoptimalkan berbagai sumber dukungan, antara lain Dana Desa, Corporate Social Responsibility (CSR). Pendekatan kolaboratif ini menjadi bentuk penguatan intervensi non-

anggaran yang berorientasi pada keberlanjutan pendidikan masyarakat, sehingga secara bertahap berkontribusi terhadap peningkatan RLS dan pembangunan manusia di Kabupaten Majalengka.

Pada tahun selanjutnya, Dinas Pendidikan akan memperkuat peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) melalui :

1. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah melalui optimalisasi perluasan akses pendidikan menengah bagi peserta didik rentan putus sekolah melalui PKBM. Serta kegiatan verifikasi dan validasi data Anak Tidak Sekolah (ATS).
2. Peningkatan layanan pendidikan kesetaraan melalui Bimbingan Teknis Penguatan Tata Kelola Pendidikan Kesetaraan.
3. Peningkatan kapasitas pengelola BOP Pendidikan Kesetaraan pada kegiatan Sosialisasi dan Rekonsiliasi Dana BOP Pendidikan Kesetaraan.
4. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1	Pengelolaan Pendidikan	Bidang Dikmas	568.969.475

7. Efisiensi anggaran

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada sasaran meningkatnya mutu pendidikan yaitu 0,054% atau sebesar Rp.309.525,- dari pagu anggaran Rp . 569.279.000,- dengan realisasi Rp . 568.969.475,-

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1.	Meningkatnya Akses Pendidikan			
		APM PAUD	94,91	99,87
		APM SD	99,46	99,99
		APM SMP	97,36	99,96
		APK Kesetaraan	120,60	99,46
2.	Meningkatkan Mutu Pendidikan			
		HLS	101,54	98,03
		RLS	101,30	99,95

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata serapan anggaran pada sasaran meningkatnya akses pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan belum mencapai 100%, sehingga masih terdapat sisa anggaran yang tidak terserap. Pada indikator APM PAUD terdapat sisa anggaran sebesar 0,13%, APM SD sebesar 0,01%, APM SMP sebesar 0,04%, APK Kesetaraan sebesar 0,54%, HLS sebesar 1,97%, dan RLS sebesar 0,05%.

Secara umum, anggaran yang tidak terserap tersebut merupakan anggaran pada kegiatan operasional dan pendukung program pendidikan, seperti efisiensi belanja barang/jasa, sisa hasil pengadaan, penyesuaian kebutuhan riil di lapangan, serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan biaya lebih rendah dari perencanaan awal. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang mengalami efisiensi akibat perubahan volume kebutuhan serta penyesuaian jadwal pelaksanaan.

Selain serapan anggaran yang belum mencapai 100%, terdapat beberapa indikator kinerja yang capaianya juga belum mencapai 100%, khususnya pada indikator APM PAUD (94,91%), APM SD (99,46%), dan APM SMP (97,36%). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar target telah mendekati sasaran, masih terdapat selisih yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan struktural.

Belum tercapainya target 100% terutama dipengaruhi oleh dinamika jumlah penduduk usia sekolah, perubahan jumlah penduduk usia sekolah sebagai basis perhitungan APM serta adanya peserta didik yang masih bersekolah namun berada di luar rentang usia APM. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan nilai APM secara statistik. Serta adanya anak usia sekolah yang belum terdata atau belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan formal.

04
PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan Jawa Barat , kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Rata-rata capaian kinerja Dinas Pendidikan pada Tahun 2025 yaitu sebesar 102,53% dari dua (2) sasaran strategis yaitu meningkatnya akses pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan. Adapun untuk rincian indikatornya kinerja sebagai berikut :

a. Sasaran Meningkatnya Akses Pendidikan
   1. APM PAUD
   2. APM SD/MI
   3. APM SMP/MTs
   4. APK Kesetaraan

b. Sasaran Meningkatnya Mutu Pendidikan
   1. Harapan Lama Sekolah (HLS)
   2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Dinas Pendidikan telah menggunakan sumber daya pada Tahun 2025 sesuai dengan peruntukannya. Efisiensi anggaran untuk sasaran meningkatnya akses pendidikan dengan indikator APK Kesetaraan yang tercapai sebesar 0,54% % atau sebesar Rp. 61.415.400,- dan sasaran meningkatnya mutu pendidikan dengan indikator HLS yang tercapai sebesar 1,97% atau sebesar Rp.6.445.414.688,00,- RLS yang tercapai sebesar 0,054% atau sebesar Rp.309.525,-. Sedangkan untuk sasaran meningkatnya akses pendidikan dengan indikator APM PAUD, APM SD/MI dan APM SMP/MTs efisiensi anggaran tidak dapat dihitung karena sasaran tidak mencapai 100%.

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.

Majalengka, 24 Pebruari 2026

Kepala Dinas Pendidikan,

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DINAS PENDIDIKAN

H.Rd.MUHAMMAD UMAR MA'RUF,S.Sos,.M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 196902121988031001

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. K. H. Abdul Halim Nomor 233 Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka 45418
Telp. (0233) 281097 Faks.(0233) 281097 Pos-el disdikmajalengkakab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 000.8.6.3/Kep.28-Disdik/2026/M

TENTANG
PENETAPAN KEPUTUSAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Preasiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Bahwa dalam implementasi kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dibutuhkan adanya tambahan aktivitas sehingga perlu adanya penambahan kegiatan;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu dilakukan Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengwasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri …… …2

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Pengganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan;
10. Keputusan Kepala Lembaga Adminstrasi Negara (LAN) Nomor 239/iX/6/8/2023 tentang Perbaikan Pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 – 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 100.3.3.2/KEP.782-BAPEDALITBANG/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA	:	Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka setiap Tahun Anggaran selama 1)satu0 tahun;
KETIGA	:	Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka adalah Dokumen Pertanggungjawaban OPD untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penentu program dan kegiatan prioritas untuk tahun 2025, dengan memiliki keselarasan terhadap dokumen Rencana pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029;
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal: 05 Pebruari 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA,

Rd. MUHAMMAD UMAR MA'RUF

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Majalengka
Nomor : 000.8.6.3/Kep.28-Disdik/2026/M
Tanggal : 05 Pebruari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Eti Rohaeti, S.P NIP. 197407202009032005	Sekretaris	Penanggungjawab
2	Joko Setiyono, M.Kom NIP. 197910182014081002	Perencana Ahli Muda	Ketua
3	Nining Dwi Pujaningsih, S.M. NIP. 197312302014062002	Penelaah Kebijakan Teknis	Anggota
4	Aam Anshorulhaq, S.Pd. NIP. 198508232019031004	Penelaah Kebijakan Teknis	Anggota
4	Fazri Rahmatika, S.E. NIP. 199311192022031006	Penelaah Kebijakan Teknis	Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA,

Rd.MUHAMMAD UMAR MA'RUF

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. Rd. MUHAMMAD UMAR MA'RUF, S.Sos., M.Si.**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. DEDI SUPANDI**
Jabatan : Pj. Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, 07 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
H. DEDI SUPANDI	**H. Rd. MUHAMMAD UMAR MA'RUF, S.Sos., M.Si.** NIP. 19690212 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akses pendidikan	APM PAUD	95.75 %
		APM SD	91.28 %
		APM SMP	88.25 %
		APK Kesetaraan	53.50 %
2.	Meningkatkan Mutu Pendidikan	HLS	12.31 Tahun
		RLS	7.71 Tahun

Program		Anggaran		Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	576.145.402.220,00	APBD
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp	496.560.308.712,00	Dekonsentrasi/DAU/ Bankeu
3.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp	714.689.354,00	APBD
JUMLAH		**Rp**	**1.073.420.400.286,00**	

Majalengka, 07 Januari 2025

Pj. Bupati Majalengka,

H. DEDI SUPANDI

Kepala Dinas Pendidikan,

H. Rd. MUHAMMAD UMAR MA'RUF, S.Sos., M.Si.
NIP. 19690212 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. Rd. MUHAMMAD UMAR MA`RUF, S.Sos., M.Si.**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, 06 Oktober 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.	**H. Rd. MUHAMMAD UMAR MA`RUF, S.Sos., M.Si.** NIP. 19690212 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akses pendidikan	APM PAUD	95,75 %
		APM SD/MI	91,28 %
		APM SMP/MTs	88,25 %
		APK Nonformal	36,64 %
2.	Meningkatkan Mutu Pendidikan	HLS	12.31 Tahun
		RLS	7.71 Tahun

	Program	Anggaran		Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp	546.065.111.823,00	APBD
2.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp	503.688.777.598,00	Dekonsentrasi/DAU/ Bankeu
3.	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp	691.168.108,00	APBD
	JUMLAH	**Rp**	**1.050.445.057.529,00**	

Bupati Majalengka,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Majalengka, 06 Oktober 2025

Kepala Dinas Pendidikan,

H. Rd. MUHAMMAD UMAR MA`RUF, S.Sos., M.Si.
NIP. 19690212 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. Rd. MUHAMMAD UMAR MA`RUF, S.Sos., M.Si.**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, 17 Nopember 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.	**H. Rd. MUHAMMAD UMAR MA`RUF, S.Sos., M.Si.** NIP. 19690212 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akses pendidikan	APM PAUD	95.75 %
		APM SD	91.28 %
		APM SMP	88.25 %
		APK Kesetaraan	53.50 %
2.	Meningkatkan Mutu Pendidikan	HLS	12.31 Tahun
		RLS	7.71 Tahun

	Program	Anggaran		Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA	Rp	539.821.649.828,00	Dekonsntrasi/DAU
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp	510.143.724.570,00	APBD
3.	PROGRAM PENDIDIK DN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp	691.168.108,00	APBD
	JUMLAH	**Rp**	**1.050.656.542.506,00**	

Majalengka, 17 Nopember 2025

Bupati Majalengka,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Kepala Dinas Pendidikan,

H. Rd. MUHAMMAD UMAR MA`RUF, S.Sos., M.Si.
NIP. 19690212 198803 1 001

Menurunnya Penduduk Miskin

Indikator :
- Persentase Penduduk Miskin

Sasaran Strategis :
Meningkatnya Akses Pendidikan

Indikator :
- APM PAUD
- APM SD/MI
- APM SMP/MTs
- APK Nonformal

Sasaran Program :
Meningkatnya Partisipasi PAUD

Indikator :
- APM PAUD

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Bantuan Anak Usia PAUD

Indikator :
- Persentase Pemenuhan Penerima Bantuan PAUD
- Jumlah Laporan Dana BOP Yang Terekap

Sasaran Sub Kegiatan :
Terekapnya laporan dana BOSP PAUD

Indikator :
- Jumlah laporan dana BOSP yang terekap

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersalurkannya bantuan perlengkapan siswa PAUD

Indikator :
- Jumlah siswa penerima bantuan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terdataynya siswa penerima BOSP PAUD

Indikator :
- Jumlah laporan data siswa penerima BOSP PAUD

Sasaran Program :
Meningkatnya Partisipasi SD

Indikator :
- APM SD/MI

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Bantuan Anak Usia SD

Indikator :
- Persentase penerima bantuan anak usia SD
- Jumlah laporan Dana BOSP yang terekap

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersalurkannya Perlengkapan Peserta Didik

Indikator :
- Jumlah peserta didik yang terpenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah

Sasaran Sub Kegiatan :
Terekapnya Laporan Dana BOSP SD

Indikator :
- Jumlah laporan Dana BOSP yang terekap

Sasaran Sub Kegiatan :
Terdataynya siswa penerima BOSP SD

Indikator :
- Jumlah laporan data siswa penerima BOSP SD

Sasaran Sub Kegiatan :
Terdataynya siswa penerima Bantuan Perlengkapan siswa SD

Indikator :
- Jumlah laporan data penerima perlengkapan siswa SD

Sasaran Sub Kegiatan :
Terdataynya siswa penerima Bantuan Perlengkapan siswa Pindar jenjang SD

Indikator :
- Jumlah laporan data siswa penerima PIP

Sasaran Program :
Meningkatnya Partisipasi SMP

Indikator :
- APM SMP/MTs

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Bantuan Anak Usia SMP

Indikator :
- Persentase pemenuhan penerima bantuan anak usia SMP
- Jumlah Laporan dana BOSP SMP yang terekap

Sasaran Sub Kegiatan :
Terekapnya laporan dana BOSP SMP

Indikator :
- Jumlah laporan Dana BOSP yang terekap

Sasaran Sub Kegiatan :
Terdataynya siswa penerima BOSP SMP

Indikator :
- Jumlah laporan data siswa penerima BOSP SMP

Sasaran Sub Kegiatan :
Terdataynya siswa penerima Bantuan Perlengkapan siswa SMP

Indikator :
- Jumlah laporan data penerima perlengkapan siswa SMP

Sasaran Sub Kegiatan :
Terdataynya siswa penerima Bantuan Perlengkapan siswa Pindar jenjang SMP

Indikator :
- Jumlah laporan data siswa penerima PIP

Sasaran Program :
Meningkatnya Partisipasi Nonformal/Kesetaraan

Indikator :
- APK Kesetaraan

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Bantuan Siswa Kesetaraan

Indikator :
- Jumlah Laporan Dana BOSP Nonformal yang terekap

Sasaran Sub Kegiatan :
Terekapnya laporan dana BOSP Nonformal

Indikator :
- Jumlah laporan dana BOSP Nonformal/kesetaraan yang terekap

Sasaran Sub Kegiatan :
Terekapnya data siswa penerima BOSP Nonformal

Indikator :
- Jumlah laporan data siswa penerima BOSP Nonformal

Sasaran Program :
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Indikator :
- Nilai RB General

Sasaran Kegiatan :
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator :
- Nilai SAKIP Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator :
- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersusunya Dokumen SKPD

Indikator :
- Jumlah Dokumen DPA SKPD

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersusunya Dokumen Perubahan DPA SKPD

Indikator :
- Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersusunya Dokumen Pengukuran & Pelaporan Perangkat Daerah

Indikator :
- Jumlah dokumen Pelaporan PD yang disusun

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersusunya Dokumen RKA 2026

Indikator :
- Jumlah dokumen RKA Tahun 2026

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersusunya Dokumen Perubahan RKA 2025

Indikator :
- Jumlah dokumen perubahan RKA tahun 2025

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersusunya Dokumen Manajemen Risiko SKPD

Indikator :
- Jumlah Dokumen Manajemen Risiko

Sasaran Sub Kegiatan :
Terevaluasinya kinerja Perangkat Daerah

Indikator :
- Jumlah Kinerja Sasaran Strategis yang dievaluasi, Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan yang terevaluasi

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersusunya LKPD Kab, Non Kab dan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Indikator :
- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator :
- % Realisasi APBD PD

Sasaran Sub Kegiatan :
ASN menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu

Indikator :
- Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu

Sasaran Sub Kegiatan :
Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan

Indikator :
- Persentase SPM yang berhasil diverifikasi SP2D

Sasaran Sub Kegiatan :
Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan

Indikator :
- Jumlah kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersusunya data realisasi belanja daerah Dinas Pendidikan yang selaras

Indikator :
- Jumlah dokumen data realisasi belanja yang selaras

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Indikator :
- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersusunya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Indikator :
- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sasaran Kegiatan :
Dilindaklanjutinya Laporan Hasil Pemeriksaan

Indikator :
- % TLHP BPK dan APIP PD

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersusunya Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

Indikator :
- Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

Sasaran Kegiatan :
Barang Milik Daerah Tertib Administrasi

Indikator :
- % Barang Milik Daerah yang tertib Administrasi

Sasaran Sub Kegiatan :
Barang milik daerah Perangkat Daerah mendapatkan penilaian

Indikator :
- Jumlah Laporan Barang Milik Daerah PD yang mendapatkan penilaian

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator :
- Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sasaran Sub Kegiatan :
Barang Milik Daerah PD tercatat

Indikator :
- Jumlah Dokumen Pencatatan Barang Milik Daerah PD

Sasaran Kegiatan :
Barang Milik Daerah Mutakhir

Indikator :
- Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi

Sasaran Sub Kegiatan :
Barang Milik Daerah Berfungsi

Indikator :
- Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik

Sasaran Sub Kegiatan :
Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya

Indikator :
- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Sasaran Sub Kegiatan :
Terpeliharanya Aplikasi Sipendiru

Indikator :
- Jumlah Aplikasi yang terpelihara

Sasaran Sub Kegiatan :
Terpeliharanya Terwujudnya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator :
- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara

Sasaran Sub Kegiatan :
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan terfasilitasi Pajaknya

Indikator :
- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan terfasilitasi Pajaknya

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah

Indikator :
- Jumlah ASN Profesionalitas ASN PD

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersediaya pakaian dinas dan atribut kelengkapan

Indikator :
- Jumlah Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan yang tersedia

Sasaran Sub Kegiatan :
Pegawai mendapatkan penilaian kinerja

Indikator :
- Jumlah pegawai yang mendapatkan penilaian kinerja

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersediaya layanan administrasi kepegawaian

Indikator :
- Persentase permohonan layanan administrasi kepegawaian yang tertangani

Sasaran Kegiatan :
Kebutuhan Prasarana dan Sarana terpenuhi

Indikator :
- Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi

Sasaran Sub Kegiatan :
Terseediaya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator :
- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil pengadaan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terseediaya Peralatan Rumah Tangga Kantor

Indikator :
- unlah Peralatan Rumah Tangga Kantor yang tersedia

Sasaran Sub Kegiatan :
Terseediaya Peralatan Cetakan dan Penggandaan

Indikator :
- Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

Sasaran Sub Kegiatan :
Terseediaya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator :
- Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia

Sasaran Sub Kegiatan :
Terseediaya bahan logistik kantor

Indikator :
- Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terseediaya dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dicatatkan pada SPSE

Indikator :
- Persentase dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dicatatkan pada SPSE

Sasaran Kegiatan :
Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Fnot Office, Telepon, dan komunikasi terpenuhi

Indikator :
- Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Fnot Office, Telepon, dan komunikasi terpenuhi

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersediaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Telepon dan Langganan kantor

Indikator :
- Jumlah unit kerja yang terpenuhi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik beberhatan dan keamanan kantor

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersediaya Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator :
- Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sasaran Sub Kegiatan :
Surat Masuk dan Surat Keluar Terregister

Indikator :
- Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar yang Teregister

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Kualitas Informasi dan Produk Kehumasan

Indikator :
- Persentase Peningkatan Pengakses Media Informasi

Sasaran Sub Kegiatan :
Tertanganinya pengaduan Masyarakat

Indikator :
- % Pengaduan Masyarakat yang SPAN LAPOR yang tersimpulkan

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Indikator :
- Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM) PD

Sasaran Sub Kegiatan :
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Indikator :
- Jumlah Laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Sasaran Sub Kegiatan :
Terukurnya IKM

Indikator :
- Jumlah Laporan hasil IKM 1

Sasaran Sub Kegiatan :
Terpenuhinya Dokumen Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI

Indikator :
- Jumlah media publikasi Pelayanan Publik Informasi kepada masyarakat/ stakeholder penerima

Sasaran Sub Kegiatan :
Terpenuhinya Dokumen Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah/unit Kerja yang diajukan

Indikator :
- Jumlah Dokumen Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah/unit Kerja yang diajukan

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Implementasi SPBE Perangkat Daerah

Indikator :
- Nilai Konsultasi SPBE PD

Sasaran Sub Kegiatan :
Diterapkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada layanan publik

Indikator :
- Jumlah pelayanan Publik yang menggunakan SPBE

Sasaran Sub Kegiatan :
Diterapkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada administrasi pemerintahan

Indikator :
- Jumlah pelayanan administrasi pemerintahan yang menggunakan SPBE

Sasaran Sub Kegiatan :
Terpenuhinya Dokumen Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Perangkat Daerah

Indikator :
- Jumlah Dokumen Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Perangkat Daerah yang dipenuhi

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah

Indikator :
- Nilai Kualitas Kebijakan PD

Sasaran Sub Kegiatan :
Terseselaiasikannya Kebijakan Teknis

Indikator :
- Jumlah yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terseselaiasikannya Kebijakan Teknis

Indikator :
- Jumlah Kebijakan Teknis yang terselaiasikan 1 kebijakan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terpenuhinya Dokumen metadata perangkat daerah

Indikator :
- Jumlah dokumen metadata perangkat daerah

Sasaran Program :
Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan

Indikator :
- Persentase Belanja PDN Dinas Pendidikan

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Sorpossifikasi PDN

Indikator :
- Persentase dokumen pengadaan barang dan jasa yang berspesifikasi PDN

Meningkatnya kualitas pendidikan

Indikator:
ALS (Kata rata lama sekolah)

Sasaran Strategis:
Meningkatnya Mutu Pendidikan

Indikator:
Angka Rata-rata lama Sekolah (ALS)
Harapan Lama Sekolah (HLS)

Sasaran Program:
Meningkatnya Mutu SPK Pendidikan SD

Indikator:
Nilai SPK Pendidikan

Sasaran Program:
Meningkatnya Mutu SPK Pendidikan SMP

Indikator:
Nilai SPK Pendidikan

Sasaran Program:
Meningkatnya Mutu SPK Pendidikan PAUD (SOPAS)

Indikator:
Nilai SPK Pendidikan

Sasaran Program:
Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten

Indikator:
Persentase pendidikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang kompetenan

---

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Mutu dan Kompetensi Guru Pada Satuan Pendidikan SD

Indikator:
Nilai Kinerja/ Nilai Kompetensi

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Sistim Kepemimpin, Kelembagaan dan Manajemen Mutu Satuan Pendidikan SD

Indikator:
Nilai Sistim Kepemimpin Kelembagaan dan Manajemen Mutu Sitim Indonesiaku

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Kesiapan Sekolah untuk Anak Usia Prasekolah, Transisi dan Akselerasi jenjang SD

Indikator:
Nilai kesiapan sekolah SD yang terakreditasi A
Jumlah layanan Anak Satuan Pendidikan Jenjang SD

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya mutu dan Kompetensi Guru Pada satuan pendidikan SMP

Indikator:
Nilai Kinerja/ Nilai Kompetensi

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Sistim Kepemimpin, Kelembagaan dan Manajemen Mutu Satuan Pendidikan SMP

Indikator:
Nilai Sistim Kepemimpin Kelembagaan dan Manajemen Mutu Sitim Indonesiaku

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Inklusif dan Transparan dan Akuntabel jenjang SMP

Indikator:
Jumlah Sekolah unggul SMP yang terakreditasi A
Jumlah layanan Anak Satuan Pendidikan Jenjang SMP

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya pengelolaan PAUD dan Nonformal secara Inklusif dan Transparan dan Akuntabel Pendidikan Jenjang PAUD

Indikator:
Jumlah layanan PAUD yang terakreditasi unggul A
Jumlah layanan Anak Satuan Pendidikan Jenjang PAUD

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya kualitas pendidikan Kesetaraan

Indikator:
Jumlah layanan pendidikan kesetaraan

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Satuan PAUD, SD, SMP Formal, Non Formal, Nonformal / Kesetaraan

Indikator:
Persentase pendidik yang kompetenan jenjang Pencerminan Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan yang kompetenan

---

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Mutu dan Kompetensi Guru Pada Satuan Pendidikan SD

Indikator:
Jumlah Pendidikan Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator:
Jumlah Sekolah yang memiliki kurikulum/ Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Sistim Kepemimpin, Kelembagaan dan Manajemen Mutu Satuan Pendidikan SD

Indikator:
Jumlah Satuan Pendidikan yang memiliki kurikulum/ Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Kesiapan Sekolah untuk Anak Usia Prasekolah, Transisi dan Akselerasi jenjang SD

Indikator:
Jumlah Sekolah yang memiliki kurikulum/ sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya mutu dan Kompetensi Guru Pada satuan pendidikan SMP

Indikator:
Jumlah Pendidikan Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator:
Jumlah Sekolah yang memiliki kurikulum/ Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Sistim Kepemimpin, Kelembagaan dan Manajemen Mutu Satuan Pendidikan SMP

Indikator:
Jumlah Satuan Pendidikan yang memiliki kurikulum/ Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Inklusif dan Transparan dan Akuntabel jenjang SMP

Indikator:
Jumlah Sekolah unggul SMP yang terakreditasi A
Jumlah layanan Anak Satuan Pendidikan Jenjang SMP

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya pengelolaan dana BOSP SMP

Indikator:
Jumlah Sekolah yang memiliki kurikulum/ sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya pengelolaan dana BOSP PAUD

Indikator:
Jumlah Sekolah yang memiliki kurikulum/ sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya kepala PAUD tentang manajemen PAUD

Indikator:
Jumlah layanan PAUD yang mendapat kurikulum/sarana tentang manajemen sekolah

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya pendidikan Nonformal tentang manajemen pendidikan Nonformal

Indikator:
Jumlah PNF yang mendapat kurikulum/sarana tentang manajemen sekolah

Sasaran Kegiatan:
Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan

Indikator:
Jumlah pendidik yang sertifikasi

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya pengelolaan dana BOSP SD

Indikator:
Jumlah Satuan Pendidikan yang mendapat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator:
Jumlah Sekolah yang memiliki kurikulum/ Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya pengelolaan dana BOSP SD

Indikator:
Jumlah Satuan pendidikan yang melaksanakan AMBE

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya Sekolah Dasar yang melaksanakan AMBE

Indikator:
Jumlah Satuan pendidikan yang melaksanakan AMBE

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya Sekolah yang layanan Sekolahan Malam

Indikator:
Jumlah Sekolah yang layanan Sekolahan Malam

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya pengelolaan dana BOSP SMP

Indikator:
Jumlah Sekolah yang mendapat dana Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya Sekolah yang layanan Sekolahan Malam

Indikator:
Jumlah Sekolah yang layanan Sekolahan Malam

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya pendidikan kesetaraan

Indikator:
Jumlah layanan pendidikan kesetaraan

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya kepala PAUD tentang manajemen PAUD

Indikator:
Jumlah layanan PAUD yang mendapat kurikulum/sarana tentang manajemen sekolah

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya pendidikan Nonformal tentang manajemen pendidikan Nonformal

Indikator:
Jumlah PNF yang mendapat kurikulum/sarana tentang manajemen sekolah

Sasaran Kegiatan:
Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan

Indikator:
Jumlah pendidik yang sertifikasi

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya Sekolah Dasar yang melaksanakan AMBE

Indikator:
Jumlah Satuan pendidikan yang melaksanakan AMBE

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya Proses Belajar Siap Pakai Peserta Didik

Indikator:
Jumlah Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Siap Pakai

Sasaran Kegiatan:
Pemenuhan Berbahasaibu/ Anak Indonesia Hebat

Indikator:
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembelajaran anak berbahasaibu/ Anak Indonesia Hebat

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan Pendidikan Inklusif

Indikator:
Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan pendidikan inklusif

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya Aset Satuan Pendidikan SMP

Indikator:
Jumlah Ruangan Sekolah yang layanan Pendidikan SMP

Sasaran Kegiatan:
Terpenuhinya identifikasi Aset dan Sarana Sekolah Jenjang SMP

Indikator:
Jumlah Aset dan Sarana Sekolah yang telah terinventaris pada Satuan Pendidikan SMP

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya Aset Satuan Pendidikan SMP

Indikator:
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun dalam dana

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya pertengahan PAUD

Indikator:
Jumlah layanan yang layanan kebutuhan PAUD

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya pertengahan PAUD

Indikator:
Jumlah layanan yang layanan kebutuhan PAUD

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya kepala sekolah tentang manajemen PAUD

Indikator:
Jumlah layanan PAUD yang mendapat kurikulum/sarana tentang manajemen sekolah

Sasaran Kegiatan:
Pemenuhan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertama

Indikator:
Jumlah pendidik dan Tenaga Pendidik pada Satuan Pendidikan Pertama

---

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan Pendidikan Inklusif

Indikator:
Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan pendidikan inklusif

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya Aset Satuan Pendidikan Jenjang SMP terhapus

Indikator:
Jumlah Ruangan Aset Satuan Pendidikan Jenjang SMP yang dihapus

Sasaran Kegiatan:
Terpenuhinya identifikasi Aset dan Sarana Sekolah Jenjang SMP

Indikator:
Jumlah Aset dan Sarana Sekolah yang telah terinventaris pada Satuan Pendidikan SMP

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya dana BOSP PAUD yang dimiliki/pertanggjawabkan

Indikator:
Jumlah Satuan Pendidikan yang mendapatkan dana BOSP PAUD yang dimiliki/pertanggjawabkan

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya kepala PAUD tentang manajemen sekolah

Indikator:
Jumlah layanan PAUD yang mendapat kurikulum/sarana tentang manajemen sekolah

Sasaran Kegiatan:
Pemenuhan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Satuan PAUD tidak sekolah (ATS)

Indikator:
Jumlah pendidik dan tenaga pendidik PTS

Sasaran Kegiatan:
Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan

Indikator:
Jumlah pendidik yang sertifikasi

Sasaran Kegiatan:
Terpenuhinya Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator:
Jumlah Sekolah yang memiliki kurikulum/ Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya pengelolaan dana BOSP SMP

Indikator:
Jumlah Satuan Pendidikan yang mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya Aset Satuan Pendidikan SMP

Indikator:
Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun dalam dana

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya Aset Satuan Pendidikan Jenjang SMP

Indikator:
Jumlah Ruangan Aset Satuan Pendidikan Jenjang SMP yang dihapus

Sasaran Kegiatan:
Terpenuhinya identifikasi Aset dan Sarana Sekolah Jenjang SMP

Indikator:
Jumlah Aset dan Sarana Sekolah yang telah terinventaris pada Satuan Pendidikan SMP

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya pengelolaan dana BOSP PAUD

Indikator:
Jumlah Satuan Pendidikan yang mendapatkan dana BOSP PAUD

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya rumah kelas baru

Indikator:
Jumlah rumah kelas baru yang terbangun dalam dana

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya kepala PAUD tentang manajemen sekolah

Indikator:
Jumlah layanan PAUD yang mendapat kurikulum/sarana tentang manajemen sekolah

Sasaran Kegiatan:
Terfasilitasinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Indikator:
Jumlah pendidik yang sertifikasi

Sasaran Kegiatan:
**Terfasilitas

Menurunnya Penduduk Miskin

Indikator :
- Persentase Penduduk Miskin

Pengampu :
Bupati

Sasaran Strategis :
Meningkatnya Akses Pendidikan

Indikator :
- **APM PAUD**
Target : 95.75 Persen
- **APM SD/MI**
Target : 91.28 Persen
- **APM SMP/MTs**
Target : 88.35 Persen
- **APK Nonformal**
Target : 53.5 Persen

Pengampu :
Kepala Dinas Pendidikan

Sasaran Program :
Meningkatnya Partisipasi PAUD

Indikator :
APM PAUD
Target : 95.75 Persen
Program : Pengendalian Pendidikan
Anggaran : 1771947000

Pengampu :
Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan

Sasaran Program :
Meningkatnya partisipasi SD

Indikator :
APM SD/MI
Target : 91.28 Persen
Program : Pengendalian Pendidikan
Anggaran : 3361165000

Pengampu :
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan

Sasaran Program :
Meningkatnya Partisipasi SMP

Indikator :
APM SMP/MTs
Target : 88.35 Persen
Program : Pengendalian Pendidikan
Anggaran : 4626267500

Pengampu :
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan

Sasaran Program :
Meningkatnya Partisipasi Nonformal/Kesetaraan

Indikator :
APK Kesetaraan
Target : 53.5 Persen
Program : Pengendalian Pendidikan
Anggaran : 1150000000

Pengampu :
Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan

Sasaran Program :
Meningkatnya kualitas tata kelola pengelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Indikator :
- **Nilai RB Governd**
Target : 65 Nilai
Program : PENDIDIKAN MENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Anggaran : 1767429822222

Pengampu :
Sekretaris Dinas Pendidikan

Sasaran Program :
Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa Dinas Pendidikan

Indikator :
- **Persentase Belanja PDN Dinas Pendidikan**
Target : 100 Persen
Program : Pembelanja Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Anggaran : 0

Pengampu :
Sekretaris Dinas Pendidikan

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Bantuan Anak Usia PAUD

Indikator :
- **Persentase peningkatan Penerima Bantuan Anak Usia PAUD**
Target : 20 Persen
Kegiatan : Pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini
Anggaran : 12000000000
- **Jumlah Laporan Dana BOSP Nonformal**
Target : 12 Laporan
Kegiatan : Pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini
Anggaran : 1499437000

Pengampu :
Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Bantuan Anak Usia SD

Indikator :
- **Persentase penerima bantuan anak usia SD**
Target : 20 Persen
Kegiatan : Pengendalian Pendidikan Sekolah Dasar
Anggaran : 2012500000
- **Jumlah laporan dana BOSP yang tersiap**
Target : 12 Laporan
Kegiatan : Pengendalian Pendidikan Sekolah Dasar
Anggaran : 1537825000

Pengampu :
Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Bantuan Anak Usia SMP

Indikator :
- **Persentase peningkatan penerima bantuan anak usia SMP**
Target : 20 Persen
Kegiatan : Pengendalian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Anggaran : 2012275000
- **Jumlah Laporan dana BOSP Nonformal yang tersiap**
Target : 12 Laporan
Kegiatan : Pengendalian Pendidikan SMP
Anggaran : 3019425000

Pengampu :
Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Bantuan Siswa Kesetaraan

Indikator :
- **Jumlah Laporan Dana BOSP Nonformal yang tersiap**
Target : 12 Laporan
Kegiatan : Pengendalian Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Anggaran : 1145551000

Pengampu :
Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator :
- **Nilai SAKIP Dinas Pendidikan**
Target : 68 Nilai
Kegiatan : Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Anggaran : 460928250

Pengampu :
Sekretaris Dinas Pendidikan

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Aksesibilitas Informasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator :
- **% Realisasi APBD PD**
Target : 100 Persen
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Anggaran : 5721888578

Pengampu :
Sekretaris Dinas Pendidikan

Sasaran Kegiatan :
DiImplekasikannya Laporan Hasil Pemeriksaan

Indikator :
- **% TLHP BPK dan APIP PD**
Target : 100 Persen
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Anggaran : 0

Pengampu :
Sekretaris Dinas Pendidikan

Sasaran Kegiatan :
Barang Milik Daerah Tanah Administrasi

Indikator :
- **% Barang Milik Daerah yang tertata dan tertib**
Target : 100 Persen
Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah
Anggaran : 8317800

Pengampu :
Sekretaris Dinas Pendidikan

Sasaran Kegiatan :
Barang Milik Daerah Mamadai

Indikator :
- **Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah**
Target : 100 Persen
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran : 0

Pengampu :
Sekretaris Dinas Pendidikan

Sasaran Kegiatan :
Barang Milik Daerah Berfungsi

Indikator :
- **Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**
Target : 100 Persen
Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran : 34000000000

Pengampu :
Sekretaris Dinas Pendidikan

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah

Indikator :
- **Nilai Kinerja Profesionalitas ASN PD**
Target : 90 Nilai
Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Perangkat Daerah
Anggaran : 2185000000

Pengampu :
Sekretaris Dinas Pendidikan

Sasaran Kegiatan :
Kebutuhan Prasarana dan Sarana terpenuhi

Indikator :
- **Persentase kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi**
Target : 100 Persen
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran : 1555966286

Pengampu :
Sekretaris Dinas Pendidikan

Sasaran Kegiatan :
Kebutuhan Pelayanan Perkantoran Berupa Air, Listrik, Fruit Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi

Indikator :
- **Persentase sisir kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Air, Listrik, Fruit Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi**
Target : 100 Persen
Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran : 0

Pengampu :
Sekretaris Dinas Pendidikan

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Kualitas Informasi dan Produk Kehumasan

Indikator :
- **Persentase Peningkatan Penyajian Produk Informasi**
Target : Persentase
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran : 0

Pengampu :
Sekretaris Dinas Pendidikan

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Indikator :
- **Nilai Kepuasan masyarakat (SKM) PD**
Target : 87.15 Persen
Kegiatan : Pelayanan Publik Umum Perangkat Daerah
Anggaran : 0

Pengampu :
Sekretaris Dinas Pendidikan

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Implementasi SPBE Perangkat Daerah

Indikator :
- **Ketuntasan SPBE PD**
Target : 24 Nilai
Kegiatan : Pengelolaan Sistem Pemerintah Daerah
Anggaran : 0

Pengampu :
Sekretaris Dinas Pendidikan

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Implementasi Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah

Indikator :
- **Nilai Kualitas Kebijakan PD**
Target : 3.5 Nilai
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran : 0

Pengampu :
Sekretaris Dinas Pendidikan

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Berpesoalkan PDN

Indikator :
- **Persentase dokumen pengadaan barang dan jasa yang berpesoalkan PDN**
Target : 100 Persen
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran : 0

Pengampu :
Sekretaris Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terwujudnya laporan dana BOSP PAUD

Indikator :
- **Jumlah laporan dana BOSP yang tersiap**
Target : 824 Unit Karga
Pagu : Rp 429.252.500
Sub Kegiatan : Pengadaan Dana BOSP PAUD

Pengampu :
PK. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, Aset Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Sasaran Sub Kegiatan :
Terwujudnya laporan dana BOSP SD

Indikator :
- **Jumlah laporan dana BOSP yang tersiapnya kebutuhan pertengkapan sekolah**
Target : 1.832 Unit
Pagu : Rp 429.252.500
Sub Kegiatan : Pengadaan Pertengkapan Peserta Didik

Pengampu :
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terwujudnya Pertengkapan Peserta Didik

Indikator :
- **Jumlah peserta didik yang tersiapnya kebutuhan pertengkapan sekolah**
Target : 1.832 Unit
Pagu : Rp 252.127.500
Sub Kegiatan : Pengadaan Pertengkapan Peserta Didik

Pengampu :
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terwujudnya laporan dana BOSP Nonformal

Indikator :
- **Jumlah laporan dana BOSP Nonformalnya yang tersiap**
Target : 33 Unit Karga
Pagu : Rp 1.145.551.000
Sub Kegiatan : Pengadaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Pengampu :
PK. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, Aset Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator :
- **Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**
Target : 1 Dokumen
Pagu : Rp 32.796.400
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pengampu :
Perencana Ahli Muda

Sasaran Sub Kegiatan :
ASN menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu

Indikator :
- **Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu**
Target : 1855 Orang
Pagu : Rp 571.518.889.784
Sub Kegiatan : Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terwujudnya Bahan Tanggapan Pemeriksa dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

Indikator :
- **Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksa dan Tindak Lanjut Pemeriksaan**
Target : 1 Dokumen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : Bayud Pengadaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan&Laporan

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Barang milik daerah Perangkat Daerah mendapatkan penilaian

Indikator :
- **Jumlah Laporan Barang Milik Daerah PD yang mendapatkan penilaian**
Target : 1 Laporan
Pagu : Rp 24.000.000
Sub Kegiatan : Penilaian dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terpelharanya peralatan dan mesin lainnya

Indikator :
- **Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**
Target : 1 Paket
Pagu : Rp 50.000.000
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator :
- **Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
Target : 1 Paket
Pagu : Rp 512.474.590
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terwujudnya Jasa Kebersihan Kantor, Air, Listrik, Fruit Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi

Indikator :
- **Jumlah sisir kerja yang terlayani Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Kebersihan dan keamanan kantor**
Target : 7 Unit
Pagu : Rp 7.222.000.000
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terfasilitasinya pengadaan Masyarakat

Indikator :
- **% Pengaduan Masyarakat pada SPAN LAPOR yang terselesaikan**
Target : 100 Persen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Indikator :
- **Jumlah Laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD**
Target : 1 Laporan
Pagu : Rp 351.239.536
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Dirasakannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada layanan publik

Indikator :
- **Jumlah pelayanan Publik yang menerapkan SPBE**
Target : 1 Paket
Pagu : Rp 351.239.536
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terwujudnya Implementasi Kualitas Kebijakan Teknis

Indikator :
- **Jumlah yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**
Target : 120 Orang
Pagu : Rp 128.500.000
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terwujudnya Pertengkapan Sekolah Menengah Pertama

Indikator :
- **Jumlah laporan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama**
Target : 1 Laporan
Pagu : Rp 429.252.500
Sub Kegiatan : Pengadaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Pengampu :
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terwujudnya Laporan Dana BOSP SMP

Indikator :
- **Jumlah laporan Dana BOSP yang tersiapnya**
Target : 126 Laporan
Pagu : Rp 46.089.480.000
Sub Kegiatan : Pengadaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Pengampu :
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terwujudnya siswa penerima BOSP Nonformal

Indikator :
- **Jumlah laporan data siswa penerima BOSP Nonformal**
Target : 12 Dokumen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : -

Pengampu :
PK. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, Aset Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Sasaran Sub Kegiatan :
Terwujudnya Dokumen DPA SKPD

Indikator :
- **Jumlah Dokumen DPA SKPD**
Target : 1 Dokumen
Pagu : Rp 6.650.000
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD

Pengampu :
Perencana Ahli Muda

Sasaran Sub Kegiatan :
Terpenuhinya pembayaran kegiatan

Indikator :
- **Persentase BPH yang berhasil menjadi SP2D**
Target : 100 Persen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : -

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator :
- **Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**
Target : 1 Laporan
Pagu : Rp 59.173.600
Sub Kegiatan : Administasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Pegawai mendapatkan penilaian kinerja

Indikator :
- **Jumlah pegawai mendapatkan penilaian kinerja**
Target : 52 Orang
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : Monitor Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pegawai

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terpenuhinya Rumah Tangga Kantor yang tersedia

Indikator :
- **unsur Rumah Tangga Kantor yang tersedia**
Target : 1 Paket
Pagu : Rp 87.362.360
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor

Indikator :
- **Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor yang tersedia**
Target : 1 Paket
Pagu : Rp 52.485.000
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator :
- **Jumlah Layanan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
Target : 48 Orang
Pagu : Rp 1.237.944.000
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terukurnya IKM

Indikator :
- **Jumlah Laporan hasil IKM 1**
Target : 1 Laporan
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Dirasakannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada administrasi pemerintahan

Indikator :
- **Jumlah pelayanan administrasi pemerintahan yang menggunakan SPBE**
Target : 1 Paket
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terwujudnya Kebijakan Teknis yang tersusun/ulasan 1 kebijakan

Target : 1 Dokumen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terdatanya siswa penerima BOSP PAUD

Indikator :
- **Jumlah laporan data siswa PAUD penerima BOSP PAUD**
Target : 12 Dokumen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : -

Pengampu :
PK. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, Aset Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Sasaran Sub Kegiatan :
Terdatanya siswa penerima BOSP SD

Indikator :
- **Jumlah laporan data siswa penerima BOSP SD**
Target : 12 Dokumen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : -

Pengampu :
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terdatanya siswa penerima BOSP SMP

Indikator :
- **Jumlah laporan data siswa penerima BOSP SMP**
Target : 12 Dokumen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : -

Pengampu :
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terdatanya siswa penerima Bantuan Perlengkapan siswa PAUD

Indikator :
- **Jumlah laporan data penerima bantuan perlengkapan siswa PAUD**
Target : 12 Dokumen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : -

Pengampu :
PK. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, Aset Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Sasaran Sub Kegiatan :
Terdatanya siswa penerima Bantuan Perlengkapan siswa SD

Indikator :
- **Jumlah laporan data penerima perlengkapan siswa SD**
Target : 12 Dokumen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : -

Pengampu :
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terdatanya siswa penerima Bantuan Perlengkapan siswa SMP

Indikator :
- **Jumlah laporan data penerima perlengkapan siswa SMP**
Target : 12 Dokumen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : -

Pengampu :
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terdatanya siswa penerima Bantuan Program Indonesia Pintar Jenjang SD

Indikator :
- **Jumlah laporan data siswa penerima PIP**
Target : 12 Dokumen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : -

Pengampu :
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terdatanya siswa penerima Bantuan Program Indonesia Pintar Jenjang SMP

Indikator :
- **Jumlah laporan data siswa penerima PIP**
Target : 12 Dokumen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : -

Pengampu :
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Dokumen Pengakuran & Pelaporan Perangkat Daerah

Indikator :
- **Jumlah dokumen Pelaporan PD yang disusun**
Target : 2 Laporan
Pagu : Rp 375.336.000
Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pengampu :
Perencana Ahli Muda

Sasaran Sub Kegiatan :
Terwujudnya Dokumen Perubahan DPA SKPD

Indikator :
- **Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD**
Target : 1 Dokumen
Pagu : Rp 6.650.000
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD

Pengampu :
Perencana Ahli Muda

Sasaran Sub Kegiatan :
Terpenuhinya dokumen pembayaran kegiatan

Indikator :
- **Jumlah dokumen yang terpenuhi kewajiban pembayarannya**
Target : 12 Dokumen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : Pembayaran Tagihan Pihak Ketiga dan Pengadaan/Verifikasi Kwitansi SP2D&LS

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersedianya data realisasi belanja daerah Dinas Pendidikan yang selaras

Indikator :
- **Jumlah dokumen data realisasi belanja yang selaras**
Target : 12 Dokumen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Barang Milik Daerah PD tercatat

Indikator :
- **Jumlah Dokumen Pencatatan Barang Milik Daerah PD**
Target : 1 Dokumen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : Pembukuan Barang Milik Daerah pada SKPD

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terpenuhinya kewajiban pembayaran sewa terwalihara

Indikator :
- **Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terwalihara**
Target : 1 Unit
Pagu : Rp 1.000.000.000
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersedianya layanan administrasi kepegawaian yang tertangani

Indikator :
- **Persentase permohonan layanan administrasi kepegawaian yang tertangani**
Target : 100 Persen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator :
- **Jumlah barang Cetakan dan penggandaan yang tersedia**
Target : 1 Paket
Pagu : Rp 225.340.800
Sub Kegiatan : Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Surat Masuk dan Surat Keluar Terregister

Indikator :
- **Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar yang Teregister**
Target : 100 Persen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terpenuhinya Dokumen Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK 83 yang dipenuhi

Indikator :
- **Jumlah Dokumen Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK 83 yang dipenuhi**
Target : 1 Dokumen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terpenuhinya dokumen metadata perangkat daerah

Indikator :
- **Jumlah dokumen metadata perangkat daerah**
Target : 1 Dokumen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terpenuhinya Dokumen Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Perangkat Daerah

Indikator :
- **Jumlah Dokumen Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Perangkat Daerah yang dipenuhi**
Target : 1 Dokumen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terpublikasikannya Pelayanan Publik Berintegritas kepada masyarakat/ stakeholder penerima layanan

Indikator :
- **Jumlah media publikasi Pelayanan Publik Berintegritas kepada masyarakat/ stakeholder penerima layanan**
Target : 4 Dokumen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terpenuhinya Dokumen Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah/unit Kerja

Indikator :
- **Jumlah Dokumen Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah/unit Kerja yang dipenuhi**
Target : 1 Dokumen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terdatanya siswa penerima Bantuan Perlengkapan siswa SD

Indikator :
- **Jumlah laporan data penerima perlengkapan siswa SD**
Target : 12 Dokumen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : -

Pengampu :
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terdatanya siswa penerima Bantuan Perlengkapan siswa SMP

Indikator :
- **Jumlah laporan data penerima perlengkapan siswa SMP**
Target : 12 Dokumen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : -

Pengampu :
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terdatanya siswa penerima Bantuan Program Indonesia Pintar Jenjang SD

Indikator :
- **Jumlah laporan data siswa penerima PIP**
Target : 12 Dokumen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : -

Pengampu :
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terdatanya siswa penerima Bantuan Program Indonesia Pintar Jenjang SMP

Indikator :
- **Jumlah laporan data siswa penerima PIP**
Target : 12 Dokumen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : -

Pengampu :
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terwujudnya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator :
- **Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia**
Target : 1 Paket
Pagu : Rp 132.080.000
Sub Kegiatan : Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersedianya bahan logistik kantor

Indikator :
- **Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**
Target : 1 Paket
Pagu : Rp 247.520.000
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Terpenuhinya pencatatan dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada SPSE

Indikator :
- **Persentase dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dicatatkan pada SPSE**
Target : 100 Persen
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : -

Pengampu :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersusunya Laporan Hasil, Non fisik dan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Indikator :
- **Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**
Target : 2 Laporan
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pengampu :
Perencana Ahli Muda

Sasaran Sub Kegiatan :
Terwujudnya Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan yang terevaluasi
Target : 4 Laporan
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pengampu :
Perencana Ahli Muda

Sasaran Sub Kegiatan :
Terevaluasinya Kinerja Perangkat Daerah

Indikator :
- **Jumlah Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan yang terevaluasi**
Target : 4 Laporan
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pengampu :
Perencana Ahli Muda

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersusunya Laporan Hasil, Non fisik dan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Indikator :
- **Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**
Target : 2 Laporan
Pagu : Rp 0
Sub Kegiatan : Evaluasi

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Jl. Lapangan Roos Sudirman No. 1, Jakarta

Penyusun :

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Jl. Lapangan Roos Sudirman No. 1, Jakarta

Telp. (021) 52 90 101

Hasil Kerja Sama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Universitas Jenderal Soedirman

Tanggal : 17 - 19 Juli 2012

Tempat : Hotel Jambu Dua Bogor

Kepala Biro Perencanaan

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Kepala Biro Kepegawaian

Kepala Biro Keuangan

Kepala Biro Umum

Kepala Biro Humas

Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran

PRESTASI DAN PENGHARGAAN DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2025

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Nomor : 400.14.11/1444/ORG/2025

JUARA I

Di berikan kepada :

Dinas Pendidikan

Atas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah terbaik di Kabupaten Majalengka Tahun 2025

Majalengka, Desember 2025

Drs. H. Eman Suherman, M.M
Bupati Majalengka

PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : 400.14.11/1384/ORG/2025

DIBERIKAN KEPADA :

JUARA II

Dinas Pendidikan

Atas Pelayanan Publik terbaik Kabupaten Majalengka
Kategori Dinas/Badan/RSUD Tahun 2025.

Majalengka, Desember 2025
Bupati Majalengka,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M

KEMENDIKDASMEN
b-b-g-t-k Jawa Barat
HARI GURU NASIONAL 2025
PIAGAM
PENGHARGAAN
001-II/B7.2/GT.00.02/2025
DENGAN BANGGA DIBERIKAN KEPADA:
Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
Juara Umum II Kategori Dinas Pendidikan
Dalam Kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
KEPALA,
Dr. Sugito Adiwarsito, M.Pd.,O.R.
APRESIASI GTK
#PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA
RAMAH
BerAKHLAK
#bangga melayani bangsa
STOP GRATIFIKASI

AGPAII
DPD ASOSIASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDODESIA
KABUPATEN MAJALENGKA
MENGUCAPKAN
SELAMAT DAN SUKSES
AHLA ILFATULCHINA ZAKIYAH
SISWI SDN SADOMAS KABUPATEN MAJALENGKA
JUARA II MTQ
JENJANG SD PADA AJANG PAI FAIR TINGKAT NASIONAL DI JAKARTA
TANGGAL 30 NOVEMBER - 3 DESEMBER TAHUN2025
MTQ - SD
JUARA 2
Rp 4.000.00
IDING SAHIDIN, S.Pd.I
KETUA
NANA RUSMANA, S.Pd.I
SEKRETARIS

DINAS PENDIDIKAN
Kabupaten Majalengka
PAI FAIR
RAMAH
BerAKHLAK
SELAMAT DAN SUKSES
AQILA ZIDKIA-SISWI SDN SUTAWANGI II -JATIWANGI
JUARA I
PADA OLIMPIADE PAI NASIONAL JENJANG SD
PAI FAIR TAHUN 2025 TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
DAN MEWAKILI JAWA BARAT KE TINGKAT NASIONAL
AQILA ZIDKIA
SDN SUTAWANGI II

DISDIK NEWS
Selamat dan Sukses
untuk Para Penerima Penghargaan pada ajang Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Jenjang SMP Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 :
1. Juara I Biantara Putra - Ridwan Ardiansyah SMPN 2 Kadipaten
2. Juara I Aksara Sunda Putri - Amanda - SMPN 1 Talaga
3. Juara III Borangan Putra - Delvin Liu SMPN 3 Majalengka
4. Juara III Biantara Putri - Catriona SMPN 3 Majalengka
5. Juara Harepan 3 Sajak Putri - Syifa Sri Wulandari SMPN 1 Cikijing

DISDIK NEWS
Selamat dan Sukses
untuk Para Penerima Penghargaan pada ajang Gema Tunas PKBM dan SKB ke IV Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 :
1. Juara II Semaphore Putra
2. Juara III Unjuk Kabisa Kebudayaan
3. Juara III Karnaval Recycle
Disdik Majalengka
disdikmajalengkakab@gmail.com
Disdik.majalengkakab.go.id

Olimpiade Sains Nasional 2025
Peraih Penghargaan
Juara II
dan The Best Exploration
VERI AZZAM ARRASYID
Juara II
Rp. 10.000.000
DISDIK NEWS
SELAMAT DAN SUKSES
UNTUK ANANDA VERI AZZAM ARRASYID
SISWA SDN MEKARWANGI I KEC. ARGAPURA
NG TELAH MERAIH JUARA II OSN IPS JENJANG SD
IGKAT NASIONAL DAN PENGHARGAAN THE BEST
EXPLORATION

DISDIK NEWS
SELAMAT KEPADA ANAK-ANAK HEBAT YANG MENDAPATKAN
APRESIASI LOMBA DONGENG KARYA CIPTA BARU
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025
1. JELITA BERLIAN RAHMANDA-SDN PADAREK II (JUARA I)
2. MYEISHA Z. HARLINA - TK PGRI SEJAHTERA 7
3. ZAHRA YULIANTI - SDN BURUJUL WETAN IV

BUKTI SEBARAN INFORMASI LKIP DINAS PENDIDIKAN

TAHUN 2025

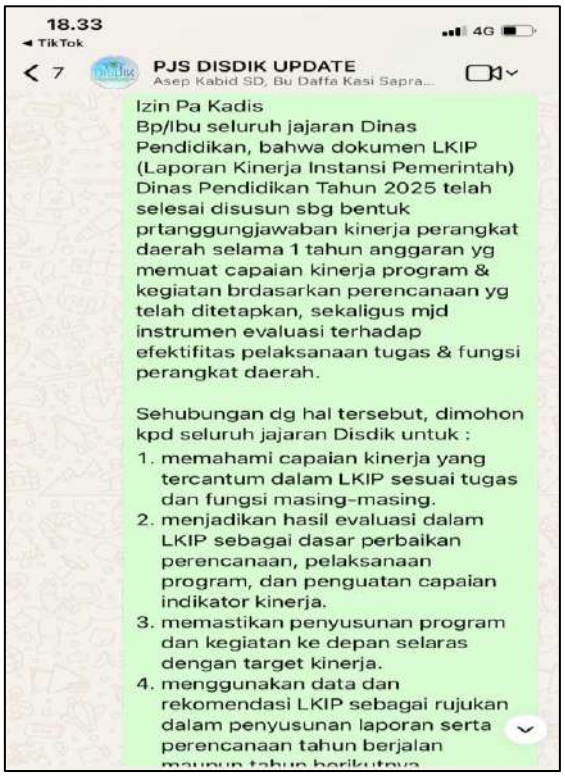

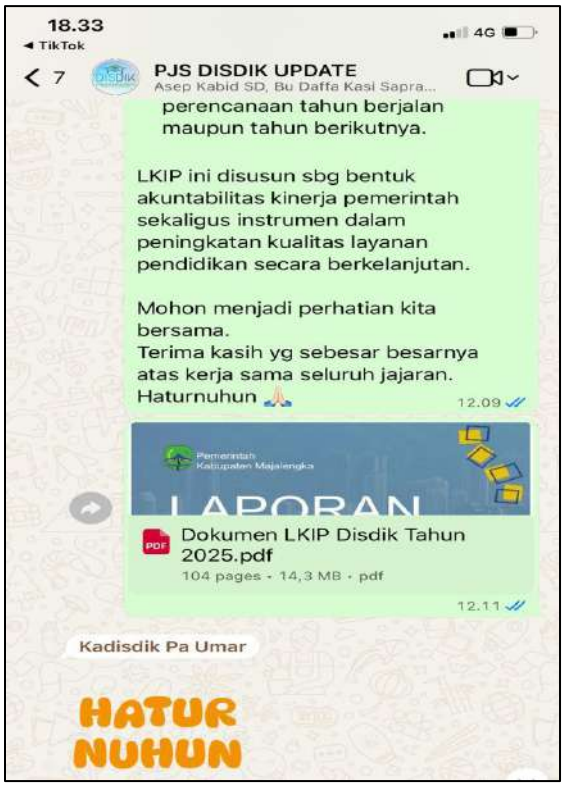

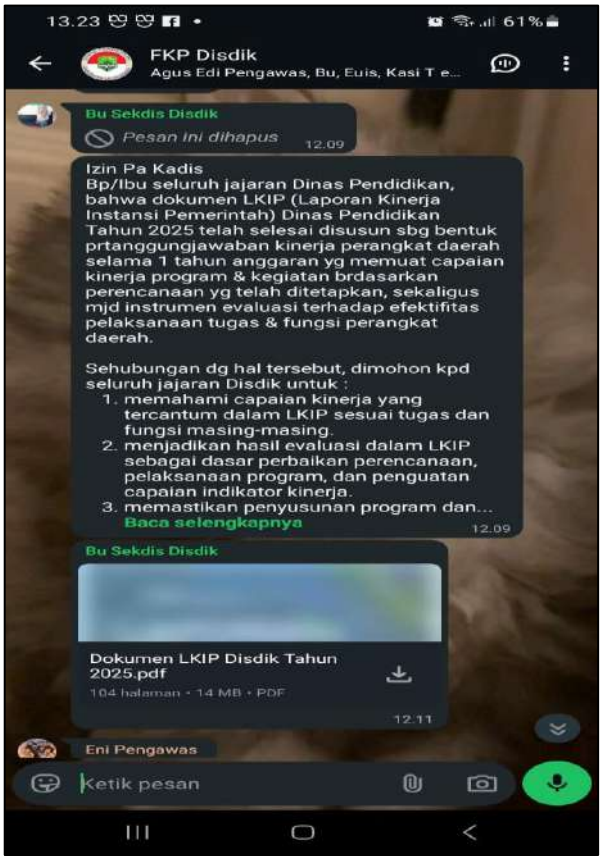

DOKUMENTASI PENYERAHAN SERTIFIKAT PENGHARGAAN

BAGI PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN

TAHUN 2025

Apresiasi Kegiatan Pelayanan Publik 2025

Apresiasi Kegiatan PMBK Jenjang SMP TH 2025

Apresiasi Kegiatan Penilaian SAKIP 2025

Apresiasi Kegiatan Apresiasi GTK TK Provinsi Jabar

Apresiasi Kegiatan Penyelenggaraan PAUD H-I

Apresiasi Kegiatan PMBK JENJANG SD TAHUN 2025

DOKUMENTASI PENYERAHAN DOKUMEN LKIP
DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2025

DOKUMENTASI RAPAT PEMBAHASAN EVALUASI KINERJA DAN RENCANA KERJA 2026 DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2025